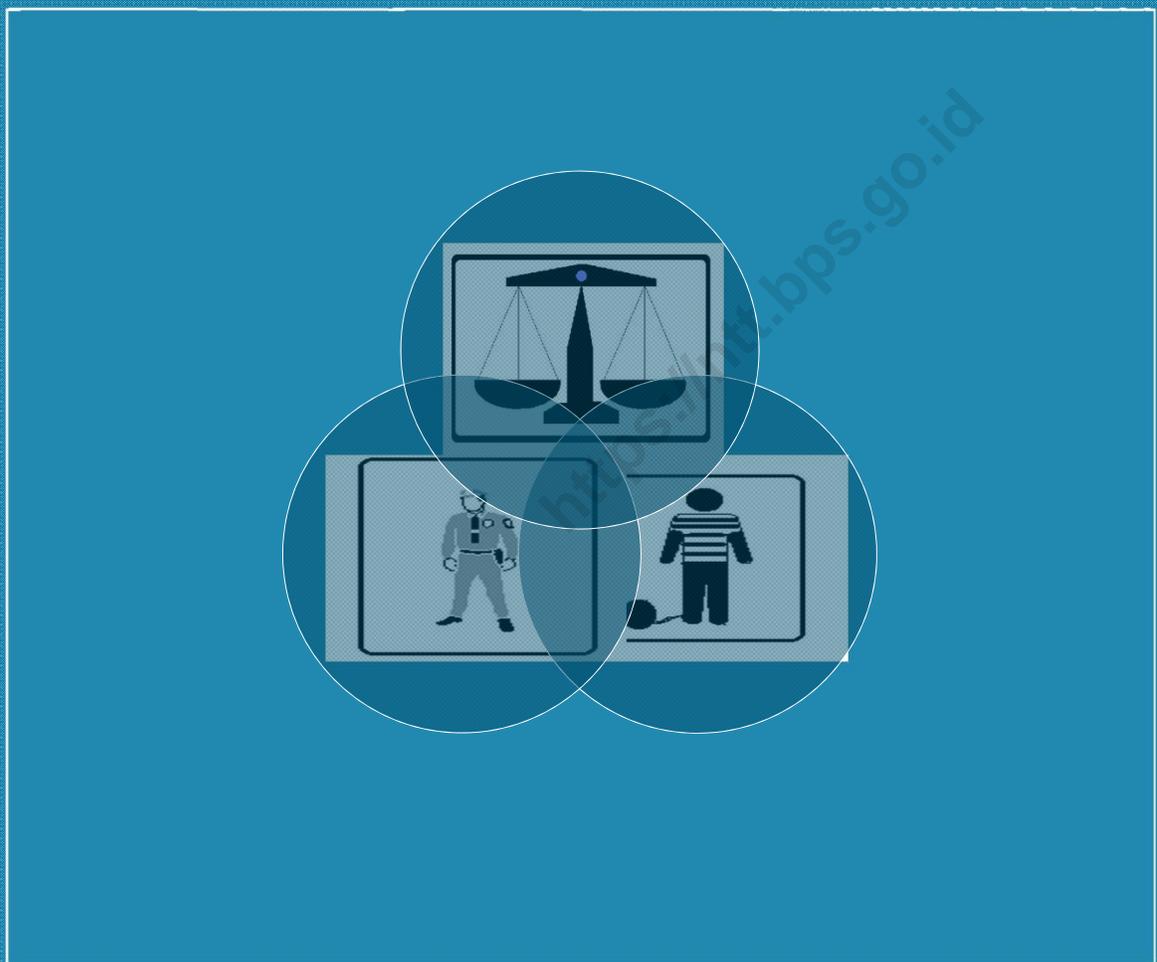
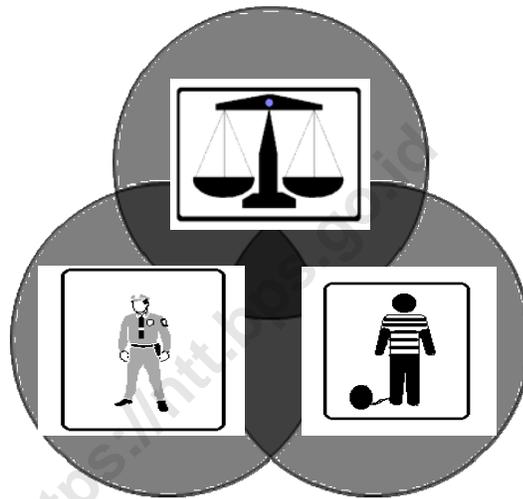


STATISTIK KRIMINAL NUSA TENGGARA TIMUR 2009 – 2011



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**STATISTIK KRIMINAL
NUSA TENGGARA TIMUR
2009-2011**



STATISTIK KRIMINAL**Nusa Tenggara Timur****2009 –2011**

No. ISSN : **No. Publikasi : 53523.1202****No. Katalog :** **Jumlah halaman : viii + 69 halaman****Ukuran : 28 cm x 21 cm****Naskah : Bidang Statistik Sosial****Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial****Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT**

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Publikasi Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2009-2011 menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Nusa Tenggara Timur. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data *series* yang berasal dari tiga sumber data yang berbeda, yaitu data Polda NTT tahun 2009, 2010, dan 2011, laporan bulanan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2009, 2010, dan 2011 serta Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2008 dan tahun 2011.

Berdasarkan data dari Polda NTT, selama tahun 2009 di NTT tercatat sebanyak 6.677 tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan. Jumlah kejadian tindak kriminalitas tersebut pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 7.709 kasus dan terus bertambah menjadi 9.077 kasus pada tahun 2011. Sejalan dengan itu, angka *crime clock* yang menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana semakin kecil yang mengindikasikan bahwa jumlah kejadian tindak pidana semakin sering terjadi selama periode tahun 2009-2011. Angka *crime clock* tahun 2009 sebesar 1°17'38" menjadi sebesar 1°7'14" pada tahun 2010 dan hanya sebesar 00°57'54" di tahun 2011. Jumlah penduduk yang beresiko menjadi korban tindak kriminalitas (*crime rate*) per 10.000 penduduk menunjukkan tren meningkat. Angka *crime rate* pada tahun 2009 sebesar 14, naik menjadi 16 pada tahun 2010, kemudian naik menjadi 19 pada tahun 2011.

Perkembangan tambahan narapidana (tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren menurun selama periode 2009-2011. Selama tahun 2009 tambahan narapidana berjumlah 3.515 orang, turun menjadi 3.085 orang di tahun 2010 dan kembali menurun menjadi 2.947 orang di tahun 2011.

Selama tahun 2008 kejadian perkelahian massal terjadi di 165 desa/kelurahan atau sebesar 5,89 persen dari 2.803 desa/kelurahan di NTT. Kejadian perkelahian massal meningkat menjadi 183 desa/kelurahan atau sebesar 6,17 persen pada tahun 2011. Sejalan dengan itu, upaya yang dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan selama periode 2008-2011.

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2009-2011 merupakan publikasi mengenai statistik kriminal yang pertama kali disusun menggunakan data *series*. Sejalan dengan itu, penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan di bidang kamtibmas setiap tahunnya.

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data series yang berasal dari tiga sumber data yang berbeda, yaitu data Polda NTT tahun 2009, 2010, dan 2011, laporan bulanan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2009, 2010, dan 2011 serta Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2008 dan tahun 2011. Data Polda NTT menggambarkan mengenai kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan. Data yang bersumber dari laporan Lembaga Pemasyarakatan menggambarkan tambahan narapidana yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan pada setiap bulan laporan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan, jenis dan jumlah kejadian konflik massal yang bersumber dari keterangan Kepala Desa/Lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat langsung dibandingkan.

Akhirnya, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan di bidang keamanan. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini terbit diucapkan terimakasih. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi pada edisi berikutnya dapat disampaikan secara langsung melalui Bidang Statistik Sosial , BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Agustus 2012

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. S. Aden Gultom, M.M
NIP. 19590605 198103 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sistematika Penyajian	2
II. Metodologi	3
2.1. Jenis dan Sumber Data	3
2.2. Konsep dan Definisi	4
2.2.1. Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Polda NTT	4
2.2.2. Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Lembaga Masyarakat	5
2.2.3. Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Podes	6
III. Kejadian Tindak Pidana dan Perkembangannya	8
3.1. Indikator-Indikator Kriminalitas	8
3.1.1. Tindak Pidana yang Dilaporkan	8
3.1.2. Tindak Pidana yang Diselesaikan	9
3.1.3. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	9
3.1.4. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 10.000 Penduduk	10
3.1.5. Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia	10
3.1.6. Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang)	11
3.1.7. Tindak Kriminalitas Menonjol	12
3.2. Perkembangan Tambahan Narapidana Lembaga Masyarakat	12
3.2.1. Tambahan Narapidana menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	12
3.2.2. Tambahan Narapidana menurut Lamanya Dipenjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri	13

3.2.3. Tambahan Narapidana menurut Jenis Kejahatan	14
3.3. Perkembangan Kejadian Tindak Pidana yang Dialami oleh Masyarakat Desa	14
IV. Perkelahian Massal	55
4.1. Kejadian Perkelahian Massal	55
4.2. Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi	56
4.3. Penyelesaian Perkelahian Massal	56
V. Upaya Menjaga Keamanan	64

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) di NTT, Tahun 2009-2011	8
Gambar 2. Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>) di NTT, Tahun 2009-2011	9
Gambar 3. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 10.000 Penduduk di NTT, Tahun 2009-2011	10
Gambar 4. Jumlah Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana di NTT, Tahun 2010-2011	11
Gambar 5. Jumlah Tindak Pidana terhadap Hak Milik menurut Jenis Tindak Pidana di NTT, Tahun 2010-2011	11
Gambar 6. Tindak Kriminalitas yang Menonjol di NTT Tahun 2010-2011	12
Gambar 7. Tiga Terbesar Jumlah Tambahan Narapidana menurut Jenis Kejahatan di NTT, Tahun 2009-2011	14
Gambar 8. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana di NTT, Tahun 2008 dan 2011	15
Gambar 9. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Selama Setahun yang Lalu, Tahun 2008 dan 2011	55
Gambar 10. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir Tahun 2008 dan 2011	56
Gambar 11. Banyaknya Desa/Kelurahan Mengalami Perkelahian Massal yang Dapat Diselesaikan dan Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah Tahun 2008 dan 2011	57
Gambar 12. Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir Tahun 2008 dan 2011	64

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.2.1.	Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011	13
Tabel 3.2.2.	Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Lamanya Dipenjara, Tahun 2009-2011	13
Tabel 3.1.	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) di Provinsi NTT, Tahun 2009-2011	16
Tabel 3.2.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>) di Provinsi NTT, Tahun 2009-2011	17
Tabel 3.3	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) di Provinsi NTT, Tahun 2009-2011	18
Tabel 3.4	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 10.000 Penduduk di Provinsi NTT, Tahun 2009-2011	19
Tabel 3.5.	Jumlah Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2010	20
Tabel 3.6.	Jumlah Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2011	21
Tabel 3.7.	Jumlah Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2010	22
Tabel 3.8.	Jumlah Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2011	23
Tabel 3.9.	Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/ Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009	24
Tabel 3.10.	Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/ Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2010	25
Tabel 3.11.	Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/ Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2011.....	26
Tabel 3.12.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Lama Dipenjara/ Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2009	27
Tabel 3.13.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Lama Dipenjara/ Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2010	28
Tabel 3.14.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Lama Dipenjara/ Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2011	29
Tabel 3.15.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/Kota, Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2009	30

Tabel 3.16.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/Kota, Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2010	32
Tabel 3.17.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/Kota, Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2011	34
Tabel 3.18.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)	36
Tabel 3.19.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Sumba Barat)	37
Tabel 3.20.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Sumba Timur)	38
Tabel 3.21.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Timor Tengah Selatan)	39
Tabel 3.22.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Timor Tengah Utara)	40
Tabel 3.23.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Belu)	41
Tabel 3.24.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Alor)	42
Tabel 3.25.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Flores Timur)	43
Tabel 3.26.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Sikka)	44
Tabel 3.27.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Ende)	45
Tabel 3.28.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Ngada)	46
Tabel 3.29.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Manggarai)	47
Tabel 3.30.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kabupaten Rote Ndao)	48
Tabel 3.31.	Tambahan Narapidana *)Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011 (Kota Kupang)	49
Tabel 3.32.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana, Tahun 2008	50
Tabel 3.33.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana, Tahun 2011	52
Tabel 3.34.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana, Tahun 2008 dan 2011	54

Tabel 4.1.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Selama Setahun Terakhir, Tahun 2008 dan 2011	58
Tabel 4.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir, Tahun 2008	59
Tabel 4.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir, Tahun 2011	60
Tabel 4.4.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 dan 2011	61
Tabel 4.5.	Banyaknya Desa/Kelurahan Mengalami Perkelahian Massal yang Dapat Diselesaikan dan Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah, Tahun 2008	62
Tabel 4.6.	Banyaknya Desa/Kelurahan Mengalami Perkelahian Massal yang Dapat Diselesaikan dan Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah, Tahun 2011	63
Tabel 5.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2008	66
Tabel 5.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2011	67
Tabel 5.3.	Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2008	68
Tabel 5.4.	Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2011	69

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rasa aman (*secure*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas. Untuk mengukur rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, misalnya dari banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat yang merupakan indikasi masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Tumbuh-kembangnya rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat yang kurang atau tidak memiliki rasa aman tidak akan mampu melakukan seluruh kegiatannya secara maksimal. Kegiatan masyarakat yang kurang optimal khususnya pada aspek ekonomi pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2009-2011 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan

berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas dan konflik massal yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

1.4. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas, pelaku tindak kejahatan/kriminalitas yang ditahan serta kejadian konflik massal yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, perbandingan serta disparitas antar kabupaten/kota dan perkembangannya antar waktu. Konflik massal yang dicakup dalam publikasi adalah konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok massa, baik yang tinggal bersama di satu wilayah, maupun yang tinggal di wilayah yang berlainan yang disertai dengan perkelahian/konflik fisik, baik dengan atau tanpa menggunakan senjata.

1.5. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Pada bagian pertama (Bab I) dijelaskan beberapa aspek penting yang melatar belakangi penyusunan publikasi ini. Pada bagian kedua (Bab II) diuraikan mengenai metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini yang meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis mengenai statistik/indikator yang disajikan. Bagian ketiga (Bab III) menyajikan kejadian tindak pidana dan perkembangannya, meliputi indikator-indikator kriminalitas, perkembangan tambahan narapidana lembaga pemasyarakatan, dan perkembangan kejadian tindak pidana yang dialami oleh masyarakat desa. Bagian keempat (Bab IV) menyajikan gambaran tentang perkelahian massal di wilayah desa/kelurahan, meliputi jumlah, jenis dan penyelesaiannya. Bagian kelima (Bab V) yang merupakan bagian terakhir menyajikan upaya menjaga keamanan yang dilakukan oleh masyarakat.

II. METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

- (1) Data mengenai kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang bersumber dari data Polda NTT melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan.
- (2) Data jumlah tambahan narapidana diperoleh dari laporan Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan daftar model LP1.
- (3) Data jenis dan jumlah kejadian konflik massal yang bersumber dari PODES tahun 2008 dan tahun 2011.

Data Polda NTT

Data yang bersumber dari pengumpulan data di Polda NTT berisi data kriminalitas yang mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan.

Laporan LP1 Lembaga Pemasyarakatan

LP1 adalah ringkasan bulanan tambahan narapidana yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan pada setiap bulan laporan. Tambahan narapidana tidak termasuk yang berasal dari lembaga pemasyarakatan lain (pindahan). Daftar model LP1 dikumpulkan oleh BPS Kab/Kota dan dikirim ke BPS Propinsi untuk dientri. Data jumlah tambahan narapidana diolah langsung dari *raw* data LP1 tahun 2009-2011.

Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2008 dan 2011

Data Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat

desa/kelurahan lainnya dan nara sumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluh pertanian (PPL) dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, super market, KUD, sarana transportasi, Bank dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian tindak kriminalitas dan konflik massal, baik antar warga desa maupun antar desa.

2.2. Konsep dan Definisi

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

2.2.1. Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Polda NTT

- a. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan

masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

- c. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

1. Angka Indeks Kejahatan (It)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk (*crime rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa kejahatan tahun } t} \times \text{detik}$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Peistiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

2.2.2. Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan

- a. Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Ditanggukannya hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.

- b. Tambahan narapidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Tidak termasuk tambahan narapidana, mereka yang dititipkan oleh lembaga pemasyarakatan, tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan (hakim) atau titipan dari instansi lain.
- c. Usia atau golongan umur terpidana/terhukum dibagi dalam kelompok :
 - i. Dewasa adalah mereka yang berumur 21 tahun dan lebih.
 - ii. Pemuda adalah mereka yang berumur antara 18 sampai dengan 20 tahun.
 - iii. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun.
- d. Residivis adalah seorang yang pernah dipidana dan telah selesai menjalani seluruh atau sebagian hukumannya, yang kemudian melakukan tindakan pidana lagi.
- e. Keadaan/isi Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana/terhukum, tahanan titipan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (hakim) dan titipan lain yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu waktu tertentu.

2.2.3. Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Podes

a. Kejahatan/Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan/kriminalitas yang digunakan dalam Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Podes lebih terfokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

b. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

1. Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

2. Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/ nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
3. Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
4. Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah, perkelahian.
5. Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
6. Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/ kelurahan/nagari.
7. Lainnya adalah perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan dan sebagainya.

<https://ntt.bps.go.id>

III. KEJADIAN TINDAK PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA

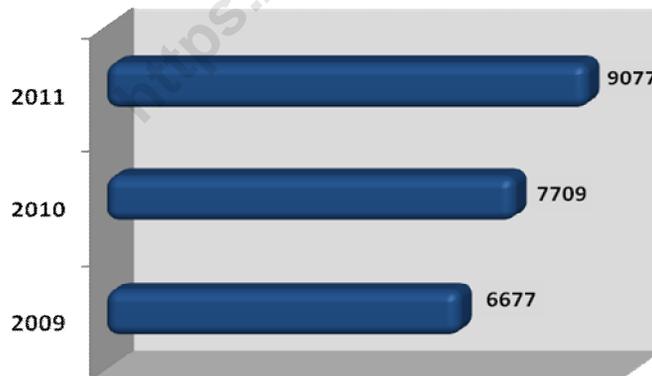
3.1. Indikator-Indikator Kriminalitas

Indikator-indikator kriminalitas berdasarkan data Polda NTT meliputi jumlah tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*), jumlah tindak pidana yang diselesaikan (*crime cleared*), persentase tindak pidana yang diselesaikan (*clearance rate*), selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*), dan resiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*).

3.1.1. Tindak Pidana yang Dilaporkan

Salah satu indikator kriminalitas adalah jumlah tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*). Berdasarkan data dari Polda NTT, selama periode tahun 2009-2011 jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi di NTT menunjukkan tren yang semakin meningkat. Jumlah kejadian tindak kriminalitas selama tahun 2009 tercatat sebanyak 6.677 kasus, meningkat menjadi 7.709 kasus pada tahun 2010 dan terus bertambah menjadi 9.077 kasus pada tahun 2011.

Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) di NTT, Tahun 2009-2011



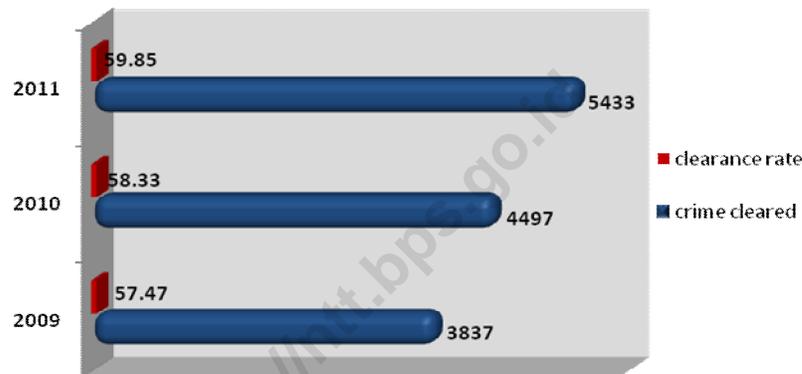
Sumber data : Polda NTT

Sementara itu, kondisi dan perkembangan tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*) dilihat menurut kabupaten/kota selama periode 2009-2011 menunjukkan pola yang sedikit berfluktuatif, dimana terdapat kabupaten/kota yang mengalami kenaikan dan ada kabupaten/kota yang mengalami penurunan maupun berfluktuatif (lihat Tabel 3.1.).

3.1.2. Tindak Pidana yang Diselesaikan

Selama periode 2009-2011, indikator jumlah tindak pidana yang telah diselesaikan (*crime cleared*) menunjukkan pola serupa dengan indikator *crime total*. Pada tahun 2009, tindak pidana yang telah diselesaikan sebanyak 3.837 kasus. Jumlah tindak pidana yang telah diselesaikan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 4.497 kasus dan meningkat kembali menjadi 5.433 kasus pada tahun 2011. Hal ini juga diikuti dengan persentase penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*), dimana pada tahun 2009 persentase penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*) sebesar 57,47 persen, meningkat menjadi 58,33 persen pada 2010 kemudian naik menjadi 59,85 persen pada tahun 2011.

Gambar 2. Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) di NTT, Tahun 2009-2011



Sumber data : Polda NTT

Berdasarkan Tabel 3.2. terlihat bahwa angka *clearance rate* untuk masing-masing kabupaten/kota selama periode 2009-2011 sangat bervariasi. Secara umum, pada periode 2009-2010 banyak kabupaten/kota mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga terlihat pada periode 2010-2011.

3.1.3. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Salah satu aspek penting dari peristiwa tindak kriminalitas adalah interval waktu terjadinya suatu kejadian tindak kriminalitas yang biasa diukur dengan menggunakan indikator *crime clock*. Angka *crime clock* NTT periode 2009-2011 menunjukkan interval waktu yang semakin pendek, dimana pada tahun 2009 sebesar 01^h17'38", kemudian berkurang menjadi 01^h07'14" pada tahun 2010 dan berkurang lagi menjadi 00^h57'54" pada tahun 2011. Interval waktu yang semakin pendek ini menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan semakin tinggi.

Angka *crime clock* NTT pada tahun 2011 adalah sebesar 00^h57'54" yang berarti bahwa secara rata-rata setiap selang waktu 57 menit dan 54 detik di Nusa Tenggara Timur terjadi satu peristiwa tindak kriminalitas. Besaran angka *crime clock* secara rinci menurut kabupaten/kota periode 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

3.1.4. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 10.000 Penduduk

Jumlah penduduk yang berisiko terkena tindak pidana (*crime rate*) di NTT menunjukkan angka yang selalu naik selama periode 2009-2011. Angka *crime rate* pada tahun 2009 sebesar 14 orang meningkat menjadi 16 orang di tahun 2010 dan terus bertambah menjadi 19 orang di tahun 2011 (Gambar 3).

Gambar 3. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 10.000 Penduduk di NTT, Tahun 2009-2011



Sumber data : Polda NTT

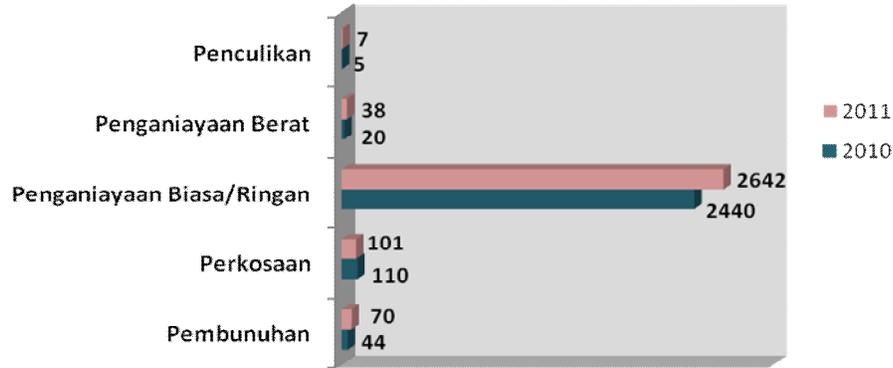
Seiring dengan pola perkembangan angka *crime rate* NTT, perkembangan angka *crime rate* untuk masing-masing kabupaten/kota selama periode yang sama menunjukkan tren yang terus meningkat, kecuali Sumba Timur dan Kota Kupang. Meskipun Kota Kupang mengalami penurunan angka *crime rate*, tetapi Kota Kupang merupakan kabupaten/kota dengan angka *crime rate* tertinggi di NTT. Sementara, kabupaten/kota yang memiliki angka *crime rate* terendah adalah Kabupaten Manggarai (lihat Tabel 3.4.).

3.1.5. Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia

Jumlah tindak pidana terhadap fisik manusia dikelompokkan dalam 5 jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan, perkosaan, penganiayaan biasa/ringan, penganiayaan berat, dan penculikan. Seperti yang disajikan pada Gambar 4 pola perkembangan kejadian tindak pidana terhadap fisik manusia selama periode 2010-2011 menunjukkan tren yang terus meningkat, kecuali tindak perkosaan. Selama periode 2010-2011, tindak pidana terhadap fisik manusia didominasi oleh tindak pidana penganiayaan biasa/ringan. Untuk jumlah

tindak pidana terhadap fisik manusia secara rinci menurut kabupaten/kota periode 2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.5. dan Tabel 3.6.

Gambar 4. Jumlah Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana di NTT, Tahun 2010-2011

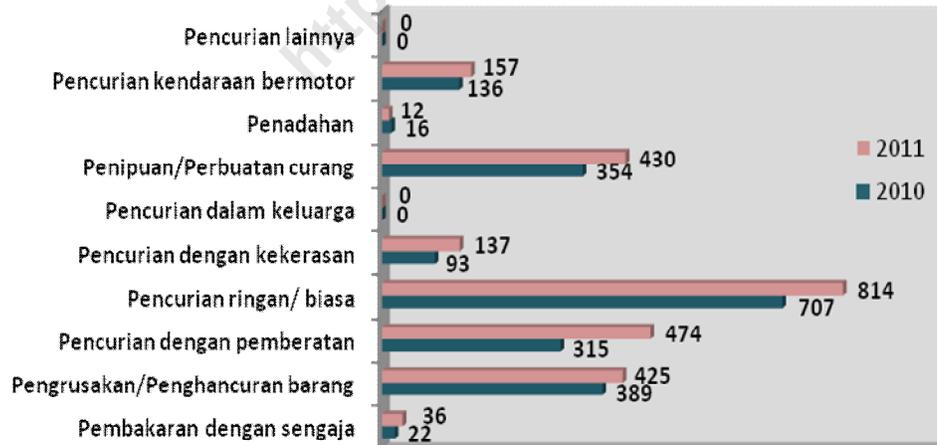


Sumber data : Polda NTT

3.1.6. Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang)

Seperti yang terlihat dalam Gambar 5, jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di NTT terhadap hak milik (barang) selama periode 2010-2011 adalah pencurian ringan/biasa. Sementara pencurian dalam keluarga dan pencurian lainnya tidak terjadi kasus selama periode yang sama.

Gambar 5. Jumlah Tindak Pidana terhadap Hak Milik menurut Jenis Tindak Pidana di NTT, Tahun 2010-2011



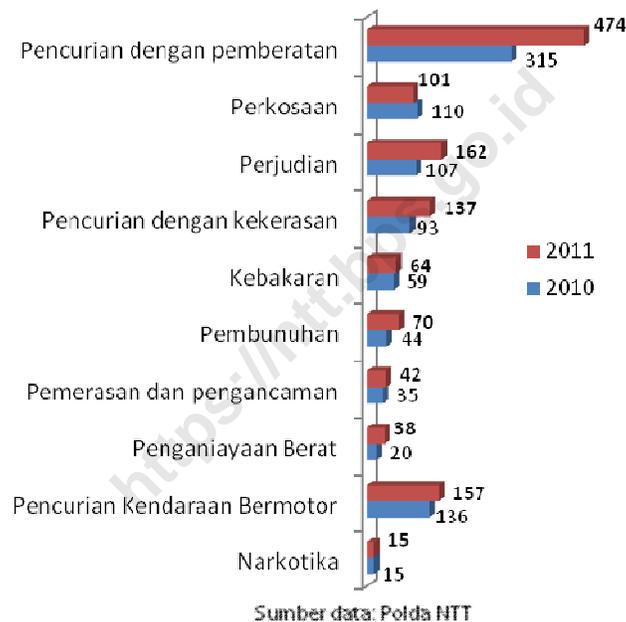
Sumber data : Polda NTT

Sejalan dengan pola tindak pidana terhadap hak milik (barang) provinsi, tindak pidana pencurian ringan/biasa juga merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di sebagian besar kabupaten/kota pada periode 2010-2011 (lihat Tabel 3.7. dan Tabel 3.8.).

3.1.7. Tindak Kriminalitas Menonjol

Peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah NTT secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Gambar 6 menunjukkan sepuluh jenis tindak kriminalitas yang tergolong sebagai tindak kriminalitas menonjol. Dari sepuluh jenis tindak kriminalitas yang tergolong sebagai tindak kriminalitas menonjol, selama periode 2010-2011 hanya satu jenis tindak kriminalitas yang mengalami penurunan jumlah kasus, yaitu perkosaan. Sementara sisanya menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus, dimana jenis tindak kriminalitas yang paling signifikan mengalami kenaikan adalah pencurian dengan pemberatan yang naik dari 315 kasus pada tahun 2010 menjadi 474 kasus pada tahun 2011.

Gambar 6. Tindak Kriminalitas yang Menonjol di NTT, Tahun 2010-2011



3.2. Perkembangan Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

3.2.1. Tambahan Narapidana menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tambahan narapidana di NTT selama periode 2009-2011 menunjukkan tren menurun. Jumlah tambahan narapidana tahun 2009 tercatat sebesar 3.515, turun menjadi 3.085 orang pada tahun 2010 dan turun kembali menjadi 2.947 orang di tahun 2011. Jika dilihat menurut kelompok umur, maka kelompok umur dewasa menunjukkan tren menurun. Sementara untuk kelompok umur pemuda dan anak-anak menunjukkan tren yang meningkat.

Tabel 3.2.1
Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kelompok Umur	2009			2010			2011		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Dewasa	3.284	120	3.404	2.869	101	2.970	2.616	119	2.735
Pemuda	65	3	68	79	5	84	146	4	150
Anak-anak	42	1	43	27	4	31	55	7	62
Jumlah	3.391	124	3.515	2.975	110	3.085	2.829	130	2.947

Catatan: *) Tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda.

3.2.2. Tambahan Narapidana menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Secara umum selama periode 2009-2011 tambahan narapidana menurut lamanya dipenjara berdasarkan putusan pengadilan negeri menunjukkan jumlah yang menurun. Sementara itu, jika dilihat secara persentase menunjukkan angka yang relatif fluktuatif kecuali untuk lama dipenjara lebih dari 5 tahun yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Selama periode 2009-2011, sebagian besar tambahan narapidana mendapat hukuman penjara kurang dari satu tahun dengan persentase diatas 50 persen. Untuk pidana mati tidak terdapat tambahan narapidana selama periode 2009-2011.

Tabel 3.2.2
Tambahan Narapidana *) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Lamanya Dipenjara, Tahun 2009-2011

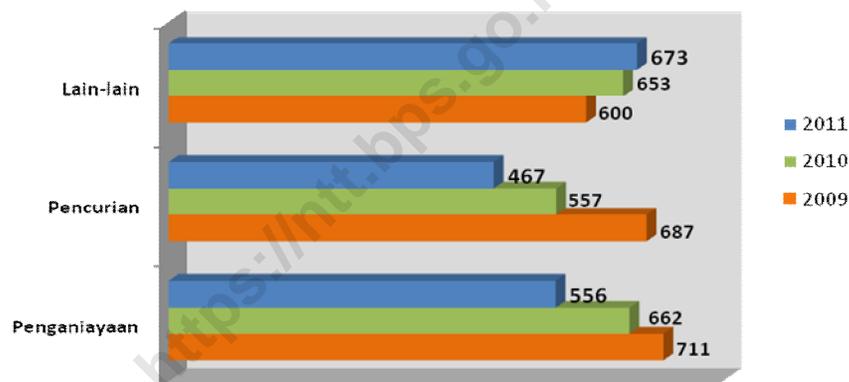
Lamanya Dipenjara	Jumlah			Persentase		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pidana Mati	-	-	-	-	-	-
Penjara Seumur Hidup	-	1	-	-	0,03	-
Penjara lebih dari 5 Tahun	478	410	377	13,60	13,29	12,79
Penjara 1 s.d 5 Tahun	876	826	752	24,92	26,77	25,52
Kurang Dari 1 Tahun	2.161	1.848	1.818	61,48	59,90	61,69
Jumlah	3.515	3.085	2.947	100,00	100,00	100,00

*) Tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda

3.2.3 Tambahan Narapidana menurut Jenis Kejahatan

Seperti yang disajikan pada gambar 7, jenis kejahatan penganiayaan, pencurian dan jenis kejahatan lain-lain merupakan jenis kejahatan yang paling banyak menyumbang tambahan narapidana pada periode 2009-2011. Selama periode tersebut, jenis kejahatan penganiayaan dan pencurian menunjukkan pola yang menurun yaitu masing-masing sebanyak 711 orang dan 687 orang di tahun 2009, berkurang menjadi sebanyak 662 orang dan 557 orang di tahun 2010 serta berkurang lagi menjadi 556 orang dan 467 orang di tahun 2011. Sementara itu, jenis kejahatan lain-lain menunjukkan pola yang berlawanan yaitu terus meningkat pada periode yang sama dari 600 orang di tahun 2009 meningkat menjadi 653 orang di tahun 2010 dan meningkat kembali 673 orang di tahun 2011. Banyaknya tambahan narapidana menurut jenis kejahatan selama periode 2009-2011 secara rinci tersaji dalam Tabel 3.15.

Gambar 7. Tiga Terbesar Jumlah Tambahan Narapidana menurut Jenis Kejahatan di NTT, Tahun 2009-2011



Sumber data : Laporan LP1

3.3. Perkembangan Kejadian Tindak Pidana yang Dialami oleh Masyarakat Desa

Jumlah desa/kelurahan di NTT pada tahun 2008 sebesar 2.803, meningkat menjadi 2.966 desa/kelurahan pada tahun 2011. Gambaran situasi dan perkembangan kejadian tindak pidana yang dialami oleh masyarakat dapat dilihat dari cakupan jumlah desa/kelurahan yang ada kejadian tindak pidana. Seperti yang disajikan pada Gambar 8, selama tahun 2008-2011 cakupan desa yang mengalami kejadian tindak pidana pencurian menunjukkan angka tertinggi mencapai lebih dari 20 persen dari jumlah total desa/kelurahan di NTT.

Gambar 8 juga menunjukkan bahwa secara umum kejadian tindak pidana yang terjadi di desa menunjukkan penurunan baik dilihat menurut jumlah maupun persentase

desa yang mengalami tindak pidana, yaitu dari 1.507 desa (53,70 persen) di tahun 2008 menjadi 1.449 desa (48,85 persen) di tahun 2011. Penurunan jumlah dan persentase desa yang mengalami kejadian tindak pidana ditunjukkan oleh menurunnya cakupan kejadian tindak pidana pencurian, pencurian dengan kekerasan/perampokan, penganiayaan, pembakaran, penyalahgunaan/pengedaran narkoba. Sementara cakupan desa yang mengalami kejadian tindak pidana perkosaan, pembunuhan, perdagangan orang dan lainnya menunjukkan peningkatan, dimana desa yang mengalami tindak pidana lainnya mengalami peningkatan paling tinggi dari sebesar 62 desa (2,21 persen) menjadi sebesar 262 desa (8,83 persen).

Peristiwa tindak pidana yang terjadi selama periode 2008-2011 pada setiap kabupaten/kota secara umum mempunyai pola yang hampir serupa dengan pola provinsi. Kejadian tindak pidana yang paling menonjol pada masing-masing kabupaten/kota selama periode tersebut berturut-turut adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan, dan lainnya (lihat Tabel 3.29. dan Tabel 3.30.).

Gambar 8. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana di NTT, Tahun 2008 dan 2011



Sumber data : Podes 2008 dan Podes 2011

Dari keseluruhan jenis tindak pidana yang terjadi selama periode 2008-2011 di NTT, tindak pidana penyalahgunaan/pengedaran narkoba dan perdagangan orang perlu mendapat perhatian. Meskipun desa yang mengalami tindak pidana penyalahgunaan/pengedaran narkoba menunjukkan penurunan jumlah, tetapi cakupan wilayahnya menunjukkan peningkatan yaitu dari hanya 6 kabupaten/kota meluas menjadi 9 kabupaten/kota. Sementara itu, desa yang mengalami tindak pidana perdagangan orang menunjukkan peningkatan jumlah dan cakupan wilayah yaitu dari 2 desa di 2 kabupaten/kota menjadi 7 desa di 3 kabupaten/kota.

Tabel 3.1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) di Provinsi NTT, Tahun 2009 - 2011

No.	Polres/Polresta	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumba Barat ¹⁾	245	276	509
2.	Sumba Timur	211	219	194
3.	Kupang ²⁾	574	770	927
4.	Timor Tengah Selatan	603	604	794
5.	Timor Tengah Utara	280	318	436
6.	Belu	802	850	968
7.	Alor	219	370	450
8.	Lembata	158	150	165
9.	Flores Timur	373	369	373
10.	Sikka	133	152	350
11.	Ende	223	323	323
12.	Ngada ³⁾	133	261	307
13.	Manggarai ⁴⁾	347	331	402
14.	Rote Ndao	233	474	510
15.	Manggarai Barat	128	125	258
16.	Kota Kupang	2.015	2.117	2.111
Provinsi NTT		6.677	7.709	9.077

Sumber : Polda NTT

Keterangan: 1. Termasuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya

2. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

3. Termasuk Kabupaten Nagekeo

4. Termasuk Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 3.2. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) di Provinsi NTT, Tahun 2009 - 2011

No.	Polres/Polresta	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumba Barat ¹⁾	54,29	27,54	53,63
2.	Sumba Timur	66,82	71,23	70,61
3.	Kupang ²⁾	80,66	77,01	63,43
4.	Timor Tengah Selatan	29,35	44,21	45,46
5.	Timor Tengah Utara	76,07	65,09	63,76
6.	Belu	58,60	59,88	57,54
7.	Alor	87,21	92,43	73,11
8.	Lembata	35,44	10,00	53,93
9.	Flores Timur	67,83	64,23	83,91
10.	Sikka	76,69	66,45	34,57
11.	Ende	78,48	82,97	76,16
12.	Ngada ³⁾	86,47	77,78	79,80
13.	Manggarai ⁴⁾	68,88	69,49	81,34
14.	Rote Ndao	59,66	63,71	59,21
15.	Manggarai Barat	63,28	52,80	69,76
16.	Kota Kupang	44,12	43,69	51,49
Provinsi NTT		57,47	58,33	59,85

Sumber : Polda NTT

Keterangan: 1. Termasuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya

2. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

3. Termasuk Kabupaten Nagekeo

4. Termasuk Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 3.3. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) di Provinsi NTT, Tahun 2009 - 2011

No.	Polres/Polresta	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 .	Sumba Barat ¹⁾	35°15'05"	31°18'15"	17°12'36"
2 .	Sumba Timur	40°56'52"	39°27'07"	45°09'16"
3 .	Kupang ²⁾	15°03'08"	11°13'14"	09°26'59"
4 .	Timor Tengah Selatan	14°19'42"	14°18'16"	11°01'57"
5 .	Timor Tengah Utara	30°51'25"	27°10'11"	20°05'30"
6 .	Belu	10°46'23"	10°09'52"	09°02'58"
7 .	Alor	39°27'07"	23°21'16"	19°28'00"
8 .	Lembata	54°41'00"	57°36'00"	53°05'27"
9 .	Flores Timur	23°09'48"	23°24'52"	23°29'07"
10 .	Sikka	64°57'44"	56°50'31"	25°01'42"
11 .	Ende	38°44'39"	26°44'57"	27°07'14"
12 .	Ngada ³⁾	64°57'44"	33°06'12"	28°32'03"
13 .	Manggarai ⁴⁾	24°53'56"	25°06'09"	21°47'27"
14 .	Rote Ndao	37°04'53"	18°13'40"	17°10'35"
15 .	Manggarai Barat	67°30'30"	69°07'12"	33°57'12"
16 .	Kota Kupang	04°17'16"	04°05'06"	04°08'58"
Provinsi NTT		01°17'38"	01°07'14"	00°57'54"

Sumber : Polda NTT

Keterangan: 1. Termasuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya

2. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

3. Termasuk Kabupaten Nagekeo

4. Termasuk Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 3.4. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 10.000 Penduduk di Provinsi NTT, Tahun 2009 - 2011

No.	Polres/Polresta	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumba Barat ¹⁾	6	6	11
2.	Sumba Timur	9	10	8
3.	Kupang ²⁾	15	20	24
4.	Timor Tengah Selatan	14	14	18
5.	Timor Tengah Utara	13	14	19
6.	Belu	17	24	27
7.	Alor	12	19	23
8.	Lembata	15	13	14
9.	Flores Timur	16	16	16
10.	Sikka	5	5	11
11.	Ende	9	12	12
12.	Ngada ³⁾	5	10	11
13.	Manggarai ⁴⁾	7	6	7
14.	Rote Ndao	20	39	42
15.	Manggarai Barat	6	6	11
16.	Kota Kupang	67	63	61
Provinsi NTT		14	16	19

Sumber : Polda NTT

Keterangan: 1. Termasuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya

2. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

3. Termasuk Kabupaten Nagekeo

4. Termasuk Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 3.5. Jumlah Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2010

No.	Polres/Polresta	Jenis Tindak Pidana				
		Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Biasa/Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumba Barat ¹⁾	6	9	62	-	-
2.	Sumba Timur	8	4	55	1	-
3.	Kupang ²⁾	4	9	208	3	-
4.	Timor Tengah Selatan	1	12	256	-	-
5.	Timor Tengah Utara	2	4	101	3	-
6.	Belu	6	5	264	-	-
7.	Alor	-	8	142	1	-
8.	Lembata	3	4	50	5	-
9.	Flores Timur	-	2	156	1	-
10.	Sikka	2	10	50	1	1
11.	Ende	-	7	91	-	-
12.	Ngada ³⁾	1	5	78	1	-
13.	Manggarai ⁴⁾	3	7	108	-	1
14.	Rote Ndao	5	7	171	-	-
15.	Manggarai Barat	1	2	31	2	-
16.	Kota Kupang	2	15	617	2	3
Provinsi NTT		44	110	2.440	20	5

Sumber : Polda NTT

Keterangan: 1. Termasuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya

2. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

3. Termasuk Kabupaten Nagekeo

4. Termasuk Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 3.6. Jumlah Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2011

No.	Polres/Polresta	Jenis Tindak Pidana				
		Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Biasa/Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumba Barat ¹⁾	13	7	148	12	-
2.	Sumba Timur	10	4	169	2	-
3.	Kupang ²⁾	4	12	213	6	1
4.	Timor Tengah Selatan	8	6	283	1	-
5.	Timor Tengah Utara	5	2	145	-	-
6.	Belu	6	-	248	-	-
7.	Alor	4	4	169	5	1
8.	Lembata	-	1	53	1	1
9.	Flores Timur	-	5	144	-	-
10.	Sikka	2	13	88	-	3
11.	Ende	-	6	73	-	-
12.	Ngada ³⁾	1	7	66	3	-
13.	Manggarai ⁴⁾	2	11	125	-	-
14.	Rote Ndao	11	9	145	6	-
15.	Manggarai Barat	1	5	51	2	-
16.	Kota Kupang	3	9	522	-	1
Provinsi NTT		70	101	2.642	38	7

Sumber : Polda NTT

Keterangan: 1. Termasuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya

2. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

3. Termasuk Kabupaten Nagekeo

4. Termasuk Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 3.7. Jumlah Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2010

No.	Polres/Polresta	Jenis Tindak Pidana									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sumba Barat (*)	2	10	31	39	6	-	17	1	5	-
2.	Sumba Timur	1	2	40	13	2	-	1	8	7	-
3.	Kupang (*)	1	41	2	57	1	-	31	-	4	-
4.	Timor Tengah Selatan	1	23	31	39	3	-	21	1	10	-
5.	Timor Tengah Utara	-	18	20	16	-	-	31	-	9	-
6.	Belu	-	24	80	40	13	-	19	2	30	-
7.	Alor	4	38	4	30	-	-	7	-	3	-
8.	Lembata	-	10	4	24	-	-	5	1	2	-
9.	Flores Timur	1	25	-	28	-	-	19	1	3	-
10.	Sikka	-	3	12	10	-	-	2	1	1	-
11.	Ende	-	17	-	42	4	-	17	-	10	-
12.	Ngada (*)	5	19	16	22	1	-	12	1	1	-
13.	Manggarai (*)	1	33	1	44	2	-	9	-	4	-
14.	Rote Ndao	4	17	9	36	1	-	26	-	1	-
15.	Manggarai Barat	-	12	5	17	2	-	9	-	2	-
16.	Kota Kupang	2	97	60	250	58	-	128	-	44	-
Provinsi NTT		22	389	315	707	93	-	354	16	136	-

Sumber: Polda NTT

Keterangan: (*) termasuk kabupaten pemekaran yang belum terdapat polres

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Pembakaran dengan sengaja | 6. Pencurian dalam keluarga |
| 2. Pengrusakan atau penghancuran barang | 7. Penipuan/perbuatan curang |
| 3. Pencurian dengan pemberatan | 8. Penadahan |
| 4. Pencurian ringan | 9. Pencurian kendaraan bermotor |
| 5. Pencurian dengan kekerasan | 10. Pencurian lainnya |

Tabel 3.8. Jumlah Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi NTT, Tahun 2011

No.	Polres/Polresta	Jenis Tindak Pidana									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sumba Barat (*)	6	27	53	47	16	-	28	-	10	-
2.	Sumba Timur	-	3	42	5	2	-	1	6	6	-
3.	Kupang (*)	3	51	4	67	4	-	18	-	5	-
4.	Timor Tengah Selatan	3	20	63	52	14	-	27	1	14	-
5.	Timor Tengah Utara	1	10	13	10	2	-	34	-	13	-
6.	Belu	8	16	77	32	29	-	25	4	30	-
7.	Alor	8	32	11	24	1	-	22	-	3	-
8.	Lembata	-	14	-	35	-	-	6	-	-	-
9.	Flores Timur	-	24	-	33	-	-	31	-	-	-
10.	Sikka	-	17	28	35	-	-	12	-	8	-
11.	Ende	-	15	2	62	3	-	17	1	9	-
12.	Ngada (*)	2	25	38	21	-	-	17	-	3	-
13.	Manggarai (*)	1	22	2	61	4	-	14	-	2	-
14.	Rote Ndao	4	44	10	47	-	-	33	-	-	-
15.	Manggarai Barat	-	9	25	23	-	-	25	-	-	-
16.	Kota Kupang	-	96	106	260	62	-	120	-	54	-
Provinsi NTT		36	425	474	814	137	-	430	12	157	-

Sumber: Polda NTT

Keterangan: (*) termasuk kabupaten pemekaran yang belum terdapat polres

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Pembakaran dengan sengaja | 6. Pencurian dalam keluarga |
| 2. Pengrusakan atau penghancuran barang | 7. Penipuan/perbuatan curang |
| 3. Pencurian dengan pemberatan | 8. Penadahan |
| 4. Pencurian ringan | 9. Pencurian kendaraan bermotor |
| 5. Pencurian dengan kekerasan | 10. Pencurian lainnya |

Tabel 3.9
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	KELOMPOK UMUR								
		Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sumba Barat	245	-	2	-	2	-	249	-	249
2	Sumba Timur	182	1	-	-	-	-	182	1	183
3	Timor Tengah Selatan	209	11	3	2	-	-	212	13	225
4	Timor Tengah Utara	142	10	4	-	6	-	152	10	162
5	Belu	228	6	1	-	1	-	230	6	236
6	Alor	95	18	19	1	1	-	115	19	134
7	Flores Timur	182	6	20	-	7	-	209	6	215
8	Sikka	153	7	1	-	3	-	157	7	164
9	Ende	123	9	15	-	16	1	154	10	164
10	Ngada	128	4	-	-	6	-	134	4	138
11	Manggarai	217	-	-	-	-	-	217	-	217
12	Rote Ndao	847	17	-	-	-	-	847	17	864
13	Kota Kupang	533	31	-	-	-	-	533	31	564
Jumlah		3.284	120	65	3	42	1	3.391	124	3.515

Sumber : Laporan LP1

Keterangan : *) tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda

L = Laki-laki

P = Perempuan

Dewasa berumur 21 tahun lebih

Pemuda berumur 18-20 tahun

Anak-anak berumur kurang dari 18 tahun

Tabel 3.10
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	KELOMPOK UMUR								
		Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sumba Barat	183	1	-	2	2	-	185	3	188
2	Sumba Timur	186	3	-	-	4	-	190	3	193
3	Timor Tengah Selatan	250	9	-	-	-	-	250	9	259
4	Timor Tengah Utara	86	5	6	-	6	-	98	5	103
5	Belu	218	14	-	-	2	1	220	15	235
6	Alor	54	0	32	3	1	-	87	3	90
7	Flores Timur	151	0	20	-	1	1	172	1	173
8	Sikka	157	9	-	-	5	1	162	10	172
9	Ende	104	16	20	-	5	1	129	17	146
10	Ngada	167	6	-	-	1	-	168	6	174
11	Manggarai	150	4	-	-	-	-	150	4	154
12	Rote Ndao	766	4	-	-	-	-	766	4	770
13	Kota Kupang	397	30	1	-	-	-	398	30	428
Jumlah		2.869	101	79	5	27	4	2.975	110	3.085

Sumber : Laporan LP1

Keterangan : *) tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda

L = Laki-laki

P = Perempuan

Dewasa berumur 21 tahun lebih

Pemuda berumur 18-20 tahun

Anak-anak berumur kurang dari 18 tahun

Tabel 3.11
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	KELOMPOK UMUR								
		Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sumba Barat	184	1	5	-	-	-	189	1	190
2	Sumba Timur	201	4	2	-	1	-	204	4	208
3	Timor Tengah Selatan	278	14	-	-	-	-	278	14	292
4	Timor Tengah Utara	121	11	-	-	4	-	125	11	136
5	Belu	119	8	-	-	4	-	123	8	131
6	Alor	72	2	47	-	4	-	123	2	125
7	Flores Timur	159	6	35	-	5	-	199	6	205
8	Sikka	160	5	-	-	9	-	169	5	174
9	Ende	129	4	27	3	20	1	176	8	184
10	Ngada	200	6	-	-	8	1	208	7	215
11	Manggarai	204	1	-	-	-	5	204	6	210
12	Rote Ndao	460	19	30	1	-	-	490	20	510
13	Kota Kupang	329	38	-	-	-	-	329	38	367
Jumlah		2.616	119	146	4	55	7	2.817	130	2.947

Sumber : Laporan LP1

Keterangan : *) tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda

L = Laki-laki

P = Perempuan

Dewasa berumur 21 tahun lebih

Pemuda berumur 18-20 tahun

Anak-anak berumur kurang dari 18 tahun

Tabel 3.12.
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin
Tahun 2009

Lama Dipenjara/Dikurung	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Dipenjara</u>				
Pidana Mati	-	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-	-
Lebih dari 5 Tahun	477	1	478	13,40
1 s/d 5 Tahun	861	15	876	24,56
Kurang dari 1 Tahun	2.053	108	2.161	60,58
Sub Jumlah	3.391	124	3.515	98,54
<u>Dikurung</u>				
Pidana Kurungan Pengganti Denda*)	49	3	52	1,46
Jumlah	3.440	127	3.567	100,00

Sumber : Laporan LP1

Keterangan : *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.13.
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin
Tahun 2010

Lama Dipenjara/Dikurung	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Dipenjara</u>				
Pidana Mati	-	-	-	-
Seumur Hidup	1	-	1	0,03
Lebih dari 5 Tahun	408	2	410	12,98
1 s/d 5 Tahun	809	17	826	26,16
Kurang dari 1 Tahun	1.757	91	1.848	58,52
Sub Jumlah	2.975	110	3.085	97,69
<u>Dikurung</u>				
Pidana Kurungan Pengganti Denda*)	70	3	73	2,31
Jumlah	3.045	113	3.158	100,00

Sumber : Laporan LP1

Keterangan : *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.14.
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
menurut Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin
Tahun 2011

Lama Dipenjara/Dikurung	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Dipenjara</u>				
Pidana Mati	-	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-	-
Lebih dari 5 Tahun	371	6	377	12,20
1 s/d 5 Tahun	728	24	752	24,33
Kurang dari 1 Tahun	1.718	100	1818	58,82
Sub Jumlah	2.817	130	2.947	95,34
<u>Dikurung</u>				
Pidana Kurungan Pengganti Denda*)	139	5	144	4,66
Jumlah	2.956	135	3.091	100.00

Sumber : Laporan LP1

Keterangan : *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.15.
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/Kota,
Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Lama Dipenjara									
		Hukuman Mati			Seumur Hidup			Lebih dari 5 Tahun			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
2	Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
3	Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	38	-	38
4	Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19
5	Belu	-	-	-	-	-	-	-	33	1	34
6	Alor	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
7	Flores Timur	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24
8	Sikka	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
9	Ende	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
10	Ngada	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
11	Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
12	Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	225	-	225
13	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	477	1	478

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Lanjutan Tabel 3.15.

No	Kabupaten/Kota	Lama Dipenjara									Pidana Kurungan Pengganti Denda			Jumlah		
		1 s/d 5 Tahun			Kurang dari 1 Tahun											
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
1	Sumba Barat	136	-	136	70	-	70	2	1	3	251	1	252			
2	Sumba Timur	97	-	97	76	1	77	-	-	-	182	1	183			
3	Timor Tengah Selatan	35	-	35	139	13	152	-	-	-	212	13	225			
4	Timor Tengah Utara	60	3	63	73	7	80	5	1	6	157	11	168			
5	Belu	36	1	37	161	4	165	3	-	3	233	6	239			
6	Alor	12	1	13	101	18	119	3	-	3	118	19	137			
7	Flores Timur	25	-	25	160	6	166	1	-	1	210	6	216			
8	Sikka	43	3	46	103	4	107	9	-	9	166	7	173			
9	Ende	22	2	24	123	8	131	13	-	13	167	10	177			
10	Ngada	13	-	13	114	4	118	12	-	12	146	4	150			
11	Manggarai	46	-	46	149	-	149	-	-	-	217	-	217			
12	Rote Ndao	250	-	250	372	17	389	-	-	-	847	17	864			
13	Kota Kupang	86	5	91	412	26	438	1	1	2	534	32	566			
Jumlah		861	15	876	2.053	108	2.161	49	3	52	3.440	127	3.567			

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.16.
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/Kota,
Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Lama Dipenjara									
		Hukuman Mati			Seumur Hidup			Lebih dari 5 Tahun			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
2	Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23
3	Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	29	1	30
4	Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
5	Belu	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
6	Alor	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Flores Timur	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
8	Sikka	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
9	Ende	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
10	Ngada	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
11	Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	229	-	229
13	Kota Kupang	-	-	-	-	1	-	-	35	-	35
Jumlah		-	-	-	-	1	-	1	408	2	410

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Lanjutan Tabel 3.16.

No	Kabupaten/Kota	Lama Dipenjara						Pidana Kurungan Pengganti Denda			Jumlah		
		1 s/d 5 Tahun			Kurang dari 1 Tahun			L	P	L+P	L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P						
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Sumba Barat	118	-	118	41	3	44	2	-	2	187	3	190
2	Sumba Timur	95	3	98	72	-	72	-	-	-	190	3	193
3	Timor Tengah Selatan	36	2	38	185	6	191	-	-	-	250	9	259
4	Timor Tengah Utara	27	-	27	58	5	63	8	-	8	106	5	111
5	Belu	31	3	34	169	12	181	-	-	-	220	15	235
6	Alor	5	-	5	81	3	84	-	-	-	87	3	90
7	Flores Timur	19	-	19	141	1	142	11	1	12	183	2	185
8	Sikka	15	2	17	138	8	146	1	1	2	163	11	174
9	Ende	22	2	24	101	14	115	24	1	25	153	18	171
10	Ngada	24	-	24	139	6	145	10	-	10	178	6	184
11	Manggarai	38	-	38	112	4	116	14	-	14	164	4	168
12	Rote Ndao	313	-	313	224	4	228	-	-	-	766	4	770
13	Kota Kupang	66	5	71	296	25	321	-	-	-	398	30	428
Jumlah		809	17	826	1.757	91	1.848	70	3	73	3.045	113	3.158

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.17.
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut Kabupaten/Kota,
Lama Dipenjara/Dikurung dan Jenis Kelamin, Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Lama Dipenjara									
		Hukuman Mati			Seumur Hidup			Lebih dari 5 Tahun			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	34	-	34
2	Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	37	-	37
3	Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21
4	Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	14	1	15
5	Belu	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
6	Alor	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
7	Flores Timur	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
8	Sikka	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
9	Ende	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21
10	Ngada	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
11	Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7
12	Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	159	-	159
13	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	371	6	377

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Lanjutan Tabel 3.17.

No	Kabupaten/Kota	Lama Dipenjara						Pidana Kurungan Pengganti Denda	Jumlah				
		1 s/d 5 Tahun			Kurang dari 1 Tahun				L	P	L+P		
		L	P	L+P	L	P	L+P						
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Sumba Barat	100	-	100	55	1	56	6	-	6	195	1	196
2	Sumba Timur	71	3	74	96	1	97	7	-	7	211	4	215
3	Timor Tengah Selatan	39	-	39	218	14	232	-	-	-	278	14	292
4	Timor Tengah Utara	28	-	28	83	10	93	13	-	13	138	11	149
5	Belu	32	1	33	78	7	85	-	-	-	123	8	131
6	Alor	36	1	37	81	1	82	-	-	-	123	2	125
7	Flores Timur	48	1	49	133	5	138	3	-	3	202	6	208
8	Sikka	12	2	14	144	3	147	-	-	-	169	5	174
9	Ende	27	1	28	128	7	135	18	-	18	194	8	202
10	Ngada	27	-	27	167	7	174	12	-	12	220	7	227
11	Manggarai	84	-	84	118	1	119	-	-	-	204	6	210
12	Rote Ndao	159	14	173	172	6	178	-	-	-	490	20	510
13	Kota Kupang	65	1	66	245	37	282	80	5	85	421	43	464
Jumlah		728	24	752	1.718	100	1.818	139	5	144	2.956	135	3.091

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.18.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	18	-	18	5	-	5	20	-	20
3	Terhadap Ketertiban Umum	321	29	350	344	32	376	276	12	288
4	Pembakaran	50	1	51	44	1	45	35	-	35
5	Penyuapan	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	1	-	1	1	-	1	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	25	2	27	16	-	16	6	1	7
8	Kesusilaan	240	1	241	156	2	158	175	9	184
9	Perjudian	242	14	256	162	5	167	269	5	274
10	Penculikan	39	-	39	36	-	36	35	-	35
11	Pembunuhan	173	9	182	112	5	117	140	3	155
12	Penganiayaan	685	26	711	647	15	662	526	30	556
13	Pencurian	676	11	687	537	20	557	455	12	467
14	Perampokan	102	-	102	92	1	93	55	-	55
15	Memeras/Mengancam	30	1	31	8	-	8	14	-	14
16	Penggelapan	64	5	69	50	2	52	39	7	46
17	Penipuan	33	5	38	40	8	48	21	7	28
18	Merusak Barang	38	-	38	27	3	30	55	1	56
19	Dalam Jabatan	-	-	-	3	-	3	1	-	1
20	Penadahan	25	3	28	36	-	36	35	1	36
21	Ekonomi	5	-	5	14	-	14	21	1	22
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	9	2	11	4	2	6	9	-	9
24	Narkoba	3	-	3	9	-	9	4	1	5
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	2	-	2
26	Korupsi	52	5	57	49	-	49	106	19	125
27	Penyelundupan	5	-	5	1	-	1	-	-	-
28	Pelanggaran	5	-	5	14	-	14	8	-	8
29	Kenakalan	11	-	11	1	-	1	2	-	2
30	Lain-lain	587	13	600	636	17	653	647	26	673
Jumlah		3.440	127	3.567	3.045	113	3.158	2.956	135	3.091

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.19.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Sumba Barat

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	2	-	2	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	14	-	14	22	-	22	35	-	35
4	Pembakaran	4	-	4	4	-	4	2	-	2
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kesusilaan	2	-	2	2	-	2	3	-	3
9	Perjudian	5	-	5	-	-	-	-	-	-
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembunuhan	24	-	24	15	-	15	15	-	15
12	Penganiayaan	39	-	39	23	-	23	16	1	17
13	Pencurian	93	-	93	67	3	70	52	-	52
14	Perampokan	33	-	33	23	-	23	21	-	21
15	Memeras/Mengancam	3	-	3	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	4	-	4	4	-	4	1	-	1
17	Penipuan	1	-	1	3	-	3	-	-	-
18	Merusak Barang	1	-	1	-	-	-	1	-	1
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	3	-	3	3	-	3	3	-	3
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	6	1	7	1	-	1	-	-	-
27	Penyelundupan	4	-	4	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	2	-	2	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	1	-	1	1	-	1	-	-	-
30	Lain-lain	9	-	9	19	-	19	46	-	46
Jumlah		251	1	252	187	3	190	195	1	196

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.20.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Sumba Timur

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	5	-	5	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	26	-	26	5	-	5	11	-	11
4	Pembakaran	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kesusilaan	2	-	2	1	-	1	8	-	8
9	Perjudian	5	-	5	4	-	4	4	-	4
10	Penculikan	1	-	1	-	-	-	3	-	3
11	Pembunuhan	1	-	1	21	1	22	11	-	11
12	Penganiayaan	19	1	20	25	-	25	34	-	34
13	Pencurian	64	-	64	61	1	62	59	1	60
14	Perampokan	1	-	1	9	-	9	2	-	2
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	2	-	2	1	-	1	3	-	3
17	Penipuan	3	-	3	1	-	1	1	-	1
18	Merusak Barang	3	-	3	-	-	-	-	-	-
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	12	-	12	9	-	9	14	-	14
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	1	-	1	1	-	1
24	Narkoba	2	-	2	8	-	8	1	1	2
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	40	-	40	38	1	39	58	2	60
	Jumlah	182	1	183	190	3	193	211	4	215

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.21.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	19	7	26	4	-	4	25	-	25
4	Pembakaran	4	-	4	-	-	-	1	-	1
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	5	-	5	1	-	1	1	-	1
8	Kesusilaan	36	-	36	38	-	38	26	4	30
9	Perjudian	7	2	9	14	-	14	30	1	31
10	Penculikan	1	-	1	3	-	3	1	-	1
11	Pembunuhan	15	1	16	8	1	9	4	-	4
12	Penganiayaan	56	2	58	109	6	115	109	7	116
13	Pencurian	31	-	31	31	1	32	38	1	39
14	Perampokan	1	-	1	1	-	1	3	-	3
15	Memeras/Mengancam	3	-	3	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	2	-	2	3	-	3	1	-	1
17	Penipuan	2	-	2	5	1	6	3	1	4
18	Merusak Barang	3	-	3	12	-	12	-	-	-
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	-	-	-	1	-	1	3	-	3
21	Ekonomi	-	-	-	4	-	4	2	-	2
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	9	1	10	4	-	4	5	-	5
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	16	-	16	12	-	12	26	-	26
Jumlah		212	13	225	250	9	259	278	14	292

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.22.
Tambahan Narapidana*) berdasarkan Putusan Pengadilan menurut Jenis
Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	10	4	14	10	2	12	18	4	22
4	Pembakaran	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	5	-	5	2	-	2	-	-	-
8	Kesusilaan	4	-	4	1	-	1	3	-	3
9	Perjudian	1	-	1	4	-	4	5	-	5
10	Penculikan	7	-	7	1	-	1	4	-	4
11	Pembunuhan	10	2	12	1	-	1	5	1	6
12	Penganiayaan	38	1	39	17	-	17	18	4	22
13	Pencurian	24	1	25	18	1	19	20	-	20
14	Perampokan	4	-	4	3	-	3	-	-	-
15	Memeras/Mengancam	4	-	4	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	5	1	6	-	1	1	1	2	3
17	Penipuan	4	-	4	3	-	3	1	-	1
18	Merusak Barang	3	-	3	-	-	-	3	-	3
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
21	Ekonomi	-	-	-	1	-	1	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	1	-	1	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	3	-	3
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	1	-	1
26	Korupsi	2	1	3	6	-	6	18	-	18
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	6	-	6	6	-	6
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	36	1	37	31	1	32	31	-	31
Jumlah		157	11	168	106	5	111	138	11	149

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.23.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Belu

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	46	3	49	63	7	70	19	3	22
4	Pembakaran	-	-	-	2	1	3	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kesusilaan	4	-	4	10	-	10	1	-	1
9	Perjudian	13	-	13	16	2	18	3	1	4
10	Penculikan	6	-	6	4	-	4	5	-	5
11	Pembunuhan	9	1	10	2	-	2	1	1	2
12	Penganiayaan	34	-	34	39	-	39	30	1	31
13	Pencurian	35	1	36	21	-	21	19	1	20
14	Perampokan	5	-	5	3	-	3	3	-	3
15	Memeras/Mengancam	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	9	1	10	6	1	7	3	-	3
17	Penipuan	1	-	1	2	-	2	4	1	5
18	Merusak Barang	-	-	-	-	-	-	1	-	1
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	1	-	1	-	-	-	2	-	2
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	69	-	69	52	4	4	32	-	32
	Jumlah	233	6	239	220	15	235	123	8	131

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.24.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Alor

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Terhadap Ketertiban Umum	21	7	28	31	-	31	41	-	41
4	Pembakaran	5	1	6	1	-	1	2	-	2
5	Penyuapan	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	2	-	2	-	-	-
8	Kesusilaan	8	-	8	6	-	6	13	-	13
9	Perjudian	14	3	17	-	-	-	3	-	3
10	Penculikan	-	-	-	3	-	3	1	-	1
11	Pembunuhan	1	-	1	2	-	2	1	-	1
12	Penganiayaan	20	7	27	14	-	14	22	-	22
13	Pencurian	19	-	19	1	-	1	5	-	5
14	Perampokan	4	-	4	1	-	1	1	-	1
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	6	1	7	1	-	1	1	1	2
17	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Merusak Barang	2	-	2	-	-	-	-	-	-
19	Dalam Jabatan	-	-	-	3	-	3	-	-	-
20	Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ekonomi	5	-	5	9	-	9	5	-	5
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	1	-	1	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	13	-	13	11	3	14	25	1	26
Jumlah		118	19	137	87	3	90	123	2	125

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.25.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Flores Timur

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	16	-	16
3	Terhadap Ketertiban Umum	29	-	29	6	-	6	15	-	15
4	Pembakaran	-	-	-	16	-	16	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	6	-	6	3	-	3
8	Kesusilaan	24	-	24	14	-	14	21	-	21
9	Perjudian	42	4	46	25	-	25	35	1	36
10	Penculikan	2	-	2	7	-	7	5	-	5
11	Pembunuhan	5	-	5	8	-	8	13	1	14
12	Penganiayaan	40	-	40	34	-	34	35	3	38
13	Pencurian	15	-	15	23	-	23	10	-	10
14	Perampokan	1	-	1	1	1	2	-	-	-
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	Penggelapan	1	-	1	-	-	-	3	-	3
17	Penipuan	2	-	2	-	-	-	1	-	1
18	Merusak Barang	7	-	7	-	-	-	1	-	1
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	-	-	-	-	-	-	5	-	5
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	14	1	15
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	1	-	1	-	-	-	-	-	-
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	2	-	2
30	Lain-lain	41	2	43	43	1	44	22	-	22
Jumlah		210	6	216	183	2	185	202	6	208

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.26.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Sikka

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	3	-	3	30	3	33	18	-	18
4	Pembakaran	-	-	-	1	-	1	1	-	1
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	1	-	1	-	-	-	2	-	2
8	Kesusilaan	35	-	35	12	-	12	23	-	23
9	Perjudian	31	1	32	11	-	11	57	-	57
10	Penculikan	-	-	-	4	-	4	2	-	2
11	Pembunuhan	4	2	6	2	2	4	1	-	1
12	Penganiayaan	40	2	42	50	-	50	20	-	20
13	Pencurian	23	1	24	17	3	20	28	3	31
14	Perampokan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	1	-	1	-	-	-
16	Penggelapan	4	1	5	5	-	5	-	-	-
17	Penipuan	1	-	1	-	1	1	2	2	4
18	Merusak Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	24	-	24	30	2	32	14	-	14
Jumlah		166	7	173	163	11	174	169	5	174

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.27.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Ende

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	32	2	34	24	5	29	38	-	38
4	Pembakaran	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	1	1	-	-	-	-	-	-
8	Kesusilaan	5	-	5	12	2	14	7	1	8
9	Perjudian	12	2	14	3	-	3	11	-	11
10	Penculikan	10	-	10	5	-	5	6	-	6
11	Pembunuhan	1	-	1	-	1	1	10	-	10
12	Penganiayaan	27	2	29	34	3	37	17	1	18
13	Pencurian	25	2	27	13	3	16	29	5	34
14	Perampokan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	2	-	2	-	-	-	1	-	1
17	Penipuan	2	-	2	2	1	3	3	1	4
18	Merusak Barang	2	-	2	-	-	-	-	-	-
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	4	-	4	2	-	2	3	-	3
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	44	1	45	59	3	61	68	-	68
Jumlah		167	10	177	153	18	171	194	8	202

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.28.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Ngada

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	28	2	30	23	2	25	13	-	13
4	Pembakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kesusilaan	4	-	4	1	-	1	7	-	7
9	Perjudian	27	-	27	58	1	59	80	1	81
10	Penculikan	7	-	7	5	-	5	4	-	4
11	Pembunuhan	3	-	3	1	-	1	1	-	1
12	Penganiayaan	15	1	16	19	-	19	29	1	30
13	Pencurian	23	-	23	17	-	17	30	1	31
14	Perampokan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	Penggelapan	1	-	1	1	-	1	1	2	3
17	Penipuan	1	-	1	5	-	5	1	1	2
18	Merusak Barang	10	-	10	13	3	16	5	-	5
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	-	-	-	-	-	-	2	-	2
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	3	-	3	3	-	3	4	-	4
27	Penyelundupan	-	-	-	1	-	1	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	24	1	25	30	-	30	42	1	43
Jumlah		146	4	150	178	6	184	220	7	227

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.29.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Manggarai

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	2	-	2	-	-	-	-	-	-
8	Kesusilaan	20	-	20	10	-	10	8	-	8
9	Perjudian	51	-	51	4	-	4	27	-	27
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembunuhan	5	-	5	-	-	-	10	-	10
12	Penganiayaan	57	-	57	34	-	34	24	-	24
13	Pencurian	52	-	52	57	4	61	58	-	58
14	Perampokan	5	-	5	-	-	-	-	-	-
15	Memeras/Mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Penipuan	2	-	2	-	-	-	-	-	-
18	Merusak Barang	-	-	-	-	-	-	8	-	8
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	2	-	2	6	-	6	-	-	-
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	4	-	4	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	-	-	-	22	-	22	5	-	5
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	17	-	17	31	-	31	64	6	70
Jumlah		217	-	217	164	4	168	204	6	210

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.30.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kabupaten Rote Ndao

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Terhadap Ketertiban Umum	17	-	17	44	-	44	13	-	13
4	Pembakaran	32	-	32	18	-	18	15	-	15
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	-	-	-	4	-	4	-	-	-
8	Kesusilaan	58	1	59	26	-	26	18	-	18
9	Perjudian	12	-	12	14	-	14	5	1	6
10	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembunuhan	76	-	76	43	-	43	62	-	62
12	Penganiayaan	177	4	181	157	1	158	95	3	98
13	Pencurian	199	-	199	153	2	155	49	-	49
14	Perampokan	48	-	48	48	-	48	24	-	24
15	Memeras/Mengancam	7	-	7	4	-	4	2	-	2
16	Penggelapan	8	-	8	9	-	9	2	-	2
17	Penipuan	7	1	8	2	-	2	-	-	-
18	Merusak Barang	-	-	-	-	-	-	13	-	13
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penadahan	2	3	5	14	-	14	-	-	-
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Korupsi	6	-	6	9	-	9	52	13	65
27	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kenakalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	198	8	206	221	1	222	139	3	142
	Jumlah	847	17	864	766	4	770	490	20	510

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.31.
Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menurut
Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2011

Kota Kupang

No	Jenis Kejahatan	2009			2010			2011		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	16	-	16	-	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	76	4	80	82	13	95	30	5	35
4	Pembakaran	3	-	3	-	-	-	13	-	13
5	Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Memalsu Materai/Surat	12	1	13	1	-	1	-	1	1
8	Kesusilaan	38	-	38	23	-	23	37	4	41
9	Perjudian	22	2	24	9	2	11	9	-	9
10	Penculikan	5	-	5	4	-	4	4	-	4
11	Pembunuhan	19	3	22	9	-	9	6	-	18
12	Penganiayaan	123	6	129	92	5	97	77	9	86
13	Pencurian	73	6	79	58	2	60	58	-	58
14	Perampokan	-	-	-	3	-	3	-	-	-
15	Memeras/Mengancam	12	1	13	3	-	3	10	-	10
16	Penggelapan	20	1	21	20	-	20	22	2	24
17	Penipuan	7	4	11	17	5	22	5	1	6
18	Merusak Barang	7	-	7	2	-	2	23	1	24
19	Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20	Penadahan	1	-	1	1	-	1	1	1	2
21	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Narkotika	5	2	7	2	2	4	8	-	8
24	Narkoba	-	-	-	1	-	1	-	-	-
25	Psikotropika	-	-	-	-	-	-	1	-	1
26	Korupsi	25	2	27	4	-	4	22	6	28
27	Penyelundupan	1	-	1	-	-	-	-	-	-
28	Pelanggaran	3	-	3	7	-	7	2	-	2
29	Kenakalan	10	-	10	-	-	-	-	-	-
30	Lain-lain	56	-	56	60	1	61	80	13	93
Jumlah		534	32	566	398	30	428	409	43	452

Sumber : Laporan LP1

Keterangan: *) Kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Tabel 3.32. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana, Tahun 2008

No.	Kabupaten/Kota	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan/ Perampokan	Penganiayaan	Pembakaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumba Barat	25	10	2	10
2	Sumba Timur	66	12	11	10
3	Kupang ¹⁾	99	2	31	12
4	Timor Tengah Selatan	52	5	30	23
5	Timor Tengah Utara	63	6	11	3
6	Belu	89	6	42	19
7	Alor	14	-	23	13
8	Lembata	12	-	10	2
9	Flores Timur	23	-	3	9
10	Sikka	78	2	23	8
11	Ende	12	-	7	2
12	Ngada	16	-	13	2
13	Manggarai	31	-	8	3
14	Rote Ndao	17	2	15	1
15	Manggarai Barat	14	-	2	1
16	Sumba Tengah	28	6	2	9
17	Sumba Barat Daya	74	8	13	7
18	Nagekeo	15	-	4	3
19	Manggarai Timur	17	-	9	-
20	Kota Kupang	22	2	17	2
Provinsi NTT		767	61	276	139

Sumber: Podes 2008

Keterangan : 1. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

Lanjutan Tabel 3.32.

No.	Kabupaten/Kota	Perkosaan	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Lainnya
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sumba Barat	1	-	7	-	1
2	Sumba Timur	3	1	6	-	9
3	Kupang ¹⁾	14	1	6	-	2
4	Timor Tengah Selatan	8	-	7	-	16
5	Timor Tengah Utara	5	-	8	-	1
6	Belu	12	1	9	-	7
7	Alor	3	1	1	-	3
8	Lembata	3	-	1	-	3
9	Flores Timur	2	-	3	-	2
10	Sikka	10	1	3	-	4
11	Ende	5	-	2	-	1
12	Ngada	6	-	2	-	4
13	Manggarai	4	-	1	-	1
14	Rote Ndao	1	-	5	-	1
15	Manggarai Barat	1	-	3	-	1
16	Sumba Tengah	2	-	-	-	0
17	Sumba Barat Daya	5	-	11	1	2
18	Nagekeo	1	-	2	-	1
19	Manggarai Timur	10	-	-	-	1
20	Kota Kupang	9	10	3	1	2
Provinsi NTT		105	15	80	2	62

Sumber: Podes 2008

Keterangan : 1. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 3.33. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana, Tahun 2011

No.	Kabupaten/Kota	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan/Perampokan	Penganiayaan	Pembakaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumba Barat	25	7	3	5
2	Sumba Timur	79	5	19	6
3	Kupang	81	7	25	1
4	Timor Tengah Selatan	54	5	33	3
5	Timor Tengah Utara	62	6	13	4
6	Belu	50	2	21	6
7	Alor	12	-	18	4
8	Lembata	7	1	13	1
9	Flores Timur	11	1	3	1
10	Sikka	38	1	13	3
11	Ende	11	1	8	1
12	Ngada	8	1	4	-
13	Manggarai	12	1	7	2
14	Rote Ndao	27	2	19	2
15	Manggarai Barat	7	1	4	
16	Sumba Tengah	10	2	4	2
17	Sumba Barat Daya	61	5	4	11
18	Nagekeo	12	-	4	2
19	Manggarai Timur	5	-	5	1
20	Sabu Raijua	13	4	4	-
21	Kota Kupang	27	2	15	1
Provinsi NTT		612	54	239	56

Sumber: Podes 2011

Lanjutan Tabel 3.33.

No.	Kabupaten/Kota	Penyalahgunaan/ Perkosaan				Lainnya
		Perkosaan	Pengedaran Narkoba	Pembunuhan	Perdagangan Orang	
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sumba Barat	4	1	8	-	4
2	Sumba Timur	8	1	5	-	7
3	Kupang	6	-	7	-	19
4	Timor Tengah Selatan	16	-	4	4	21
5	Timor Tengah Utara	9	-	5	-	16
6	Belu	9	2	12	-	23
7	Alor	9	-	4	-	12
8	Lembata	8	-	3	-	2
9	Flores Timur	4	-	1	-	8
10	Sikka	11	2	3	2	41
11	Ende	5	-	4	-	9
12	Ngada	-	1	1	-	5
13	Manggarai	1	1	1	-	5
14	Rote Ndao	1	1	6	-	8
15	Manggarai Barat	1	-	2	-	4
16	Sumba Tengah	1	-	1	-	1
17	Sumba Barat Daya	3	-	19	-	37
18	Nagekeo	8	1	-	-	13
19	Manggarai Timur	2	-	1	-	5
20	Sabu Raijua	1	-	2	-	4
21	Kota Kupang	6	3	4	1	18
Provinsi NTT		113	13	93	7	262

Sumber: Podes 2011

Tabel 3.34. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana, Tahun 2008 dan 2011

Jenis Tindak Pidana	Banyaknya Desa/Kelurahan		Persentase Desa/Kelurahan	
	2008	2011	2008	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencurian	767	612	27.36	20.63
Pencurian dengan Kekerasan/ Perampokan	61	54	2.18	1.82
Penganiayaan	276	239	9.85	8.06
Pembakaran	139	56	4.96	1.89
Perkosaan	105	113	3.75	3.81
Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba	15	13	0.54	0.44
Pembunuhan	80	93	2.85	3.14
Perdagangan Orang	2	7	0.07	0.24
Lainnya	62	262	2.21	8.83
Jumlah	1507	1449	53.76	48.85

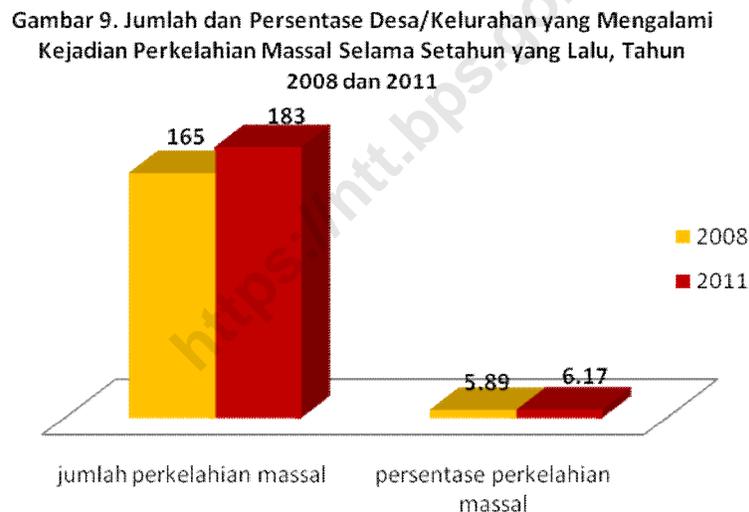
Sumber: Podes 2008 dan 2011

IV. PERKELAHIAN MASSAL

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena perkelahian massal yang terjadi di NTT serta perkembangannya selama periode 2008-2011. Kajian mengenai perkelahian massal akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi lokasi kejadian perkelahian massal. Aspek-aspek yang dapat dilihat meliputi jenis kejadian perkelahian massal serta inisiator/penengah penyelesaian perkelahian massal.

4.1. Kejadian Perkelahian Massal

Seperti yang disajikan pada Gambar 9., selama tahun 2008 kejadian perkelahian massal terjadi di 165 desa/kelurahan atau sebesar 5,89 persen dari 2.803 desa/kelurahan di NTT. Kejadian perkelahian massal meningkat menjadi 183 desa/kelurahan atau sebesar 6.17 persen pada tahun 2011.



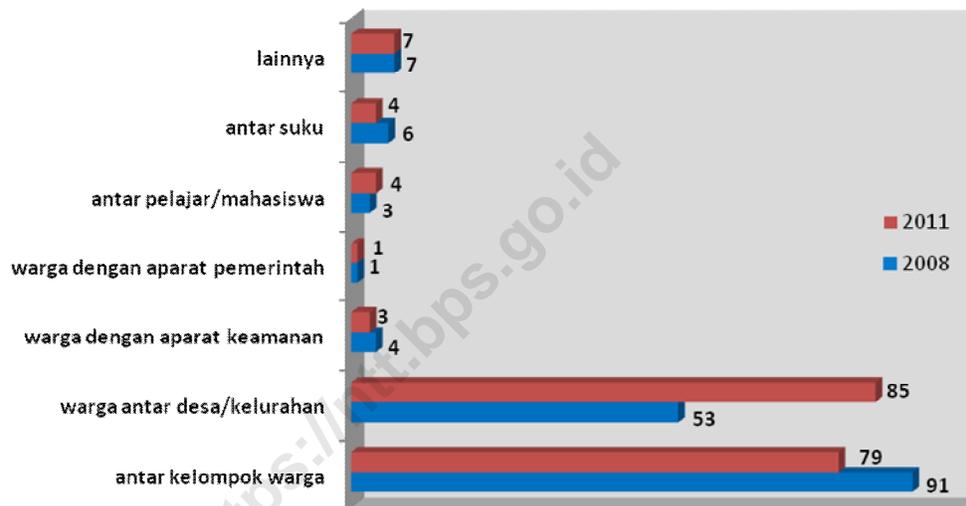
Sumber data: Podes 2008 dan 2011

Sementara jika dilihat menurut kabupaten/kota, selama periode 2008-2011 secara umum jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal meningkat. Kabupaten/kota dengan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal menunjukkan peningkatan paling signifikan adalah Kabupaten Flores Timur dimana dari 9 desa/kelurahan di tahun 2008 meningkat menjadi 28 desa/kelurahan di tahun 2011 (Tabel 4.1).

4.2. Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi

Pada tahun 2008, perkelahian massal yang paling sering terjadi selama setahun adalah perkelahian antar kelompok warga. Cakupan desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga mencapai 91 desa/kelurahan (55,15 persen). Sementara perkelahian massal yang paling sering terjadi selama setahun terakhir di tahun 2011 adalah perkelahian warga antar desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan yang mengalami perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah 85 desa/kelurahan (44,45 persen).

Gambar 10. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir Tahun 2008 dan 2011



Sumber data : Podes 2008 dan Podes 2011

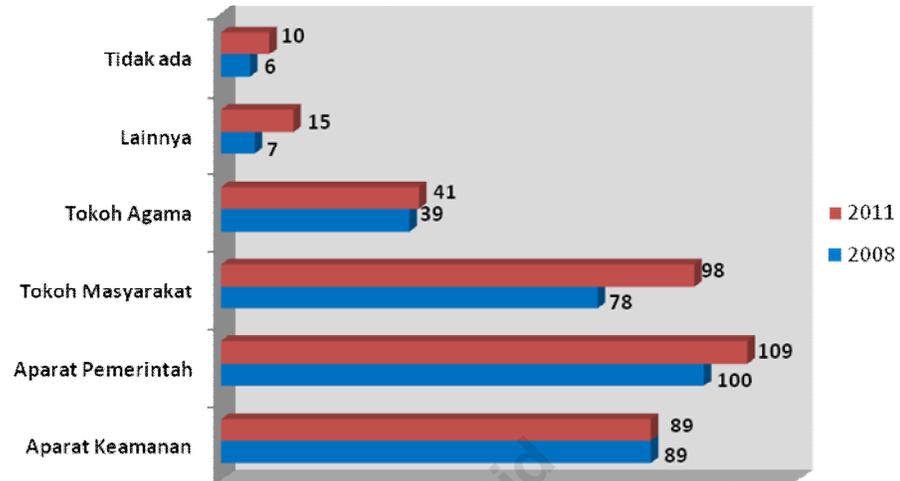
4.3. Penyelesaian Perkelahian Massal

Sebagian besar dari insiden perkelahian massal yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas. Pada tahun 2008, kabupaten/kota yang dapat menyelesaikan insiden perkelahian massal secara tuntas adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Lembata, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo dan Kota Kupang. Sementara pada tahun 2011, kabupaten/kota yang dapat menyelesaikan insiden perkelahian massal secara tuntas sebanyak 8 kabupaten/kota yaitu Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Lembata, Rote Ndao, Nagekeo, Sabu Raijua dan Kota Kupang.

Seperti yang disajikan pada Tabel 4.4, persentase desa/kelurahan yang dapat menyelesaikan konflik di wilayahnya menunjukkan penurunan dari sebesar 84,85 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 83,06 persen pada tahun 2011. Penurunan ini dikarenakan

pada tahun 2011 terdapat tiga kabupaten dimana perkelahian massal yang terjadi tidak ada dapat diselesaikan, yaitu Ngada, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.

Gambar 11. Banyaknya Desa/Kelurahan Mengalami Perkelahian Massal yang Dapat Diselesaikan dan Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah Tahun 2008 dan 2011



Sumber data : Podes 2008 dan Podes 2011

Selama periode tahun 2008-2011, nampak bahwa upaya aparat pemerintah dan partisipasi tokoh masyarakat untuk menyelesaikan perkelahian massal yang terjadi di daerahnya meningkat cukup signifikan. Seperti yang disajikan pada gambar 11, cakupan desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal dan dapat diselesaikan dengan inisiator/penengah penyelesaian masalah aparat pemerintah sebanyak 100 desa/kelurahan pada tahun 2008 meningkat menjadi 109 desa/kelurahan pada tahun 2011. Sementara cakupan desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal dan dapat diselesaikan dengan inisiator/penengah penyelesaian masalah tokoh masyarakat sebanyak 78 desa/kelurahan pada tahun 2008 meningkat menjadi 98 desa/kelurahan pada tahun 2011. Desa/kelurahan yang dapat menyelesaikan perkelahian massal tanpa ada inisiator/penengah penyelesaian masalah juga menunjukkan peningkatan dari 6 desa/kelurahan menjadi 10 desa/kelurahan.

Tabel 4.1.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal
Selama Setahun Terakhir, Tahun 2008 dan 2011

No	Kabupaten/Kota	2008		2011	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumba Barat	6	11.32	10	16.67
2	Sumba Timur	3	1.92	2	1.28
3	Kupang	8	3.33	15	8.47
4	Timor Tengah Selatan	26	10.83	6	2.50
5	Timor Tengah Utara	15	8.67	13	6.77
6	Belu	25	12.02	19	9.13
7	Alor	14	8.00	26	14.86
8	Lembata	3	2.33	8	5.56
9	Flores Timur	9	3.98	28	11.20
10	Sikka	7	4.38	2	1.25
11	Ende	5	2.35	9	4.21
12	Ngada	1	1.06	1	0.97
13	Manggarai	10	7.14	9	6.04
14	Rote Ndao	3	3.75	1	1.14
15	Manggarai Barat	1	0.83	3	2.48
16	Sumba Tengah	2	4.65	3	6.98
17	Sumba Barat Daya	16	16.67	13	13.54
18	Nagekeo	2	2.15	2	2.00
19	Manggarai Timur	4	3.51	1	0.57
20	Sabu Raijua			2	3.17
21	Kota Kupang	5	10.20	10	19.61
Provinsi NTT		165	5.89	183	6.17

Sumber: Podes 2008 dan 2011

Tabel 4.2.
Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir, Tahun 2008

No.	Kabupaten/ Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/ Kelurahan	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumba Barat	3	-	-	-	1	2	-
2	Sumba Timur	2	-	-	-	1	-	-
3	Kupang ¹⁾	2	5	-	-	-	-	1
4	Timor Tengah Selatan	22	3	-	-	1	-	-
5	Timor Tengah Utara	3	9	1	1	-	-	1
6	Belu	15	7	-	-	-	-	3
7	Alor	7	6	-	-	-	-	1
8	Lembata	1	1	1	-	-	-	-
9	Flores Timur	3	5	1	-	-	-	-
10	Sikka	5	2	-	-	-	-	-
11	Ende	4	1	-	-	-	-	-
12	Ngada	1	-	-	-	-	-	-
13	Manggarai	5	4	1	-	-	-	-
14	Rote Ndao	3	-	-	-	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	1	-	-	-	-	-
16	Sumba Tengah	2	-	-	-	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	10	2	-	-	-	4	-
18	Nagekeo	-	2	-	-	-	-	-
19	Manggarai Timur	2	2	-	-	-	-	-
20	Kota Kupang	1	3	-	-	-	-	1
Provinsi NTT		91	53	4	1	3	6	7

Sumber: Podes 2008

Keterangan : 1. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 4.3.
Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir, Tahun 2011

No.	Kabupaten/ Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/ Kelurahan	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumba Barat	3	5	-	-	2	-	-
2	Sumba Timur	2	-	-	-	-	-	-
3	Kupang	8	5	-	-	-	1	1
4	Timor Tengah Selatan	1	4	-	-	-	1	-
5	Timor Tengah Utara	7	5	-	1	-	-	-
6	Belu	11	7	-	-	1	-	-
7	Alor	10	12	2	-	-	1	1
8	Lembata	1	6	-	-	-	-	1
9	Flores Timur	4	23	-	-	-	-	1
10	Sikka	2	-	-	-	-	-	-
11	Ende	2	6	-	-	-	-	1
12	Ngada	1	-	-	-	-	-	-
13	Manggarai	5	3	-	-	-	-	1
14	Rote Ndao	-	1	-	-	-	-	-
15	Manggarai Barat	2	1	-	-	-	-	-
16	Sumba Tengah	-	2	-	-	-	1	-
17	Sumba Barat Daya	10	2	-	-	-	-	1
18	Nagekeo	1	1	-	-	-	-	-
19	Manggarai Timur	1	-	-	-	-	-	-
20	Sabu Raijua	1	1	-	-	-	-	-
21	Kota Kupang	7	1	1	-	1	-	-
Provinsi NTT		79	85	3	1	4	4	7

Sumber: Podes 2011

Tabel 4.4.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 dan 2011

No	Kabupaten/Kota	2008		2011	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumba Barat	6	100.00	8	80.00
2	Sumba Timur	3	100.00	2	100.00
3	Kupang	6	75.00	10	66.67
4	Timor Tengah Selatan	24	92.31	6	100.00
5	Timor Tengah Utara	12	80.00	13	100.00
6	Belu	17	68.00	18	94.74
7	Alor	13	92.86	21	80.77
8	Lembata	3	100.00	8	100.00
9	Flores Timur	8	88.89	24	85.71
10	Sikka	6	85.71	2	100.00
11	Ende	4	80.00	7	77.78
12	Ngada	1	100.00	-	-
13	Manggarai	9	90.00	8	88.89
14	Rote Ndao	2	66.67	1	100.00
15	Manggarai Barat	1	100.00	2	66.67
16	Sumba Tengah	1	50.00	-	-
17	Sumba Barat Daya	14	87.50	8	61.54
18	Nagekeo	2	100.00	2	100.00
19	Manggarai Timur	3	75.00	-	-
20	Sabu Raijua			2	100.00
21	Kota Kupang	5	100.00	10	100.00
Provinsi NTT		140	84.85	152	83.06

Sumber: Podes 2008 dan 2011

Tabel 4.5.
Banyaknya Desa/Kelurahan Mengalami Perkelahian Massal yang Dapat Diselesaikan dan
Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah, Tahun 2008

No.	Kabupaten/ Kota	Inisiator/Penengah					
		Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Lainnya	Tidak ada
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumba Barat	3	2	3	-	1	-
2	Sumba Timur	1	1	1	-	-	-
3	Kupang ¹⁾	2	2	4	-	-	1
4	Timor Tengah Selatan	11	19	10	5	-	-
5	Timor Tengah Utara	9	12	12	6	1	-
6	Belu	13	17	14	9	2	3
7	Alor	11	10	9	5	-	-
8	Lembata	3	3	3	3	-	-
9	Flores Timur	4	5	4	2	2	-
10	Sikka	4	4	3	-	-	-
11	Ende	4	1	1	1	1	-
12	Ngada	1	1	-	-	-	-
13	Manggarai	8	2	3	1	-	-
14	Rote Ndao	1	-	3	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	1	1	-	-	-
16	Sumba Tengah	1	1	1	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	7	9	1	3	-	2
18	Nagekeo	2	2	2	2	-	-
19	Manggarai Timur	-	3	1	-	-	-
20	Kota Kupang	4	5	2	2	-	-
Provinsi NTT		89	100	78	39	7	6

Sumber: Podes 2008

Keterangan: Inisiator/penengah penyelesaian masalah untuk satu jenis perkelahian massal dapat lebih dari satu.

1. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 4.6.
Banyaknya Desa/Kelurahan Mengalami Perkelahian Massal yang Dapat Diselesaikan dan Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah, Tahun 2011

No.	Kabupaten/ Kota	Inisiator/Penengah					Tidak ada
		Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Lainnya	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumba Barat	6	4	6	3	-	-
2	Sumba Timur	1	2	1	1	-	-
3	Kupang	8	11	9	6	1	3
4	Timor Tengah Selatan	3	5	1	1	-	1
5	Timor Tengah Utara	7	10	6	5	-	-
6	Belu	2	4	14	1	2	-
7	Alor	15	19	13	8	4	1
8	Lembata	3	6	3	3	-	-
9	Flores Timur	17	18	16	3	2	2
10	Sikka	-	1	-	-	1	-
11	Ende	4	5	3	1	1	-
12	Ngada	1	-	-	-	-	-
13	Manggarai	1	3	5	2	1	-
14	Rote Ndao	1	1	1	-	1	-
15	Manggarai Barat	-	1	2	-	-	-
16	Sumba Tengah	-	1	2	-	-	1
17	Sumba Barat Daya	8	9	7	4	1	2
18	Nagekeo	-	1	1	-	-	-
19	Manggarai Timur	1	1	-	-	-	-
20	Sabu Raijua	2	-	-	-	-	-
21	Kota Kupang	9	7	8	3	1	-
Provinsi NTT		89	109	98	41	15	10

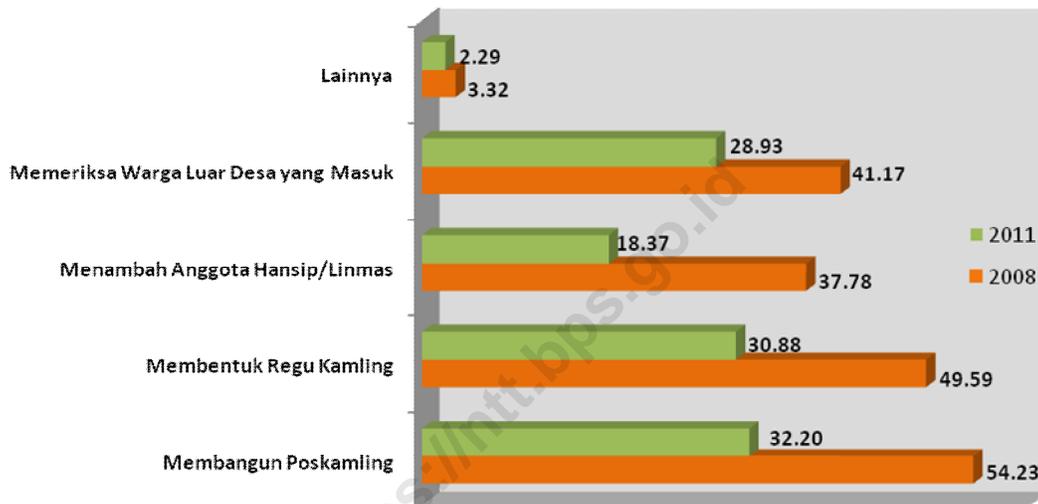
Sumber: Podes 2011

Keterangan: Inisiator/penengah penyelesaian masalah untuk satu jenis perkelahian massal dapat lebih dari satu.

V. UPAYA MENJAGA KEAMANAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama periode 2008-2011. Aspek-aspek yang dilihat meliputi cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan di desa/kelurahan tempat tinggalnya.

Gambar 12. Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir Tahun 2008 dan 2011



Sumber data : Podes 2008 dan Podes 2011

Seperti yang disajikan pada Gambar 12, selama periode 2008-2011 upaya yang dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama periode tersebut berturut-turut adalah membangun poskamling, membentuk regu kamling dan melakukan pemeriksaan warga luar desa yang masuk ke desanya. Penurunan yang paling signifikan adalah cakupan desa/kelurahan yang membangun poskamling sebesar 54,23 persen pada tahun 2008 berkurang menjadi 32,20 persen pada tahun 2011. Sementara itu, cakupan desa/kelurahan yang membentuk regu kamling dan melakukan pemeriksaan warga luar desa yang masuk ke desanya secara berturut-turut adalah 49,59 persen dan 41,17 persen di tahun 2008 menurun menjadi 30,88 persen dan 28,93 persen di tahun 2011.

Kecenderungan semakin menurunnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya selama periode 2008-2011 juga terjadi secara umum di semua kabupaten/kota. Kondisi ini terlihat dari semakin berkurangnya cakupan jumlah desa/kelurahan untuk setiap jenis upaya warga menjaga keamanan selama periode tersebut yang terjadi secara umum disemua kabupaten/kota (lihat Tabel 5.1. dan Tabel 5.2.). Selain jumlah secara absolut semakin berkurang, persentase desa/kelurahan yang melakukan upaya untuk menjaga keamanan secara umum juga semakin menurun (lihat Tabel 5.3. dan Tabel 5.4.).

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 5.1. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2008

No.	Kabupaten/Kota	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip/Linmas	Memeriksa Warga Luar Desa Lainnya yang Masuk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumba Barat	38	31	5	22	1
2	Sumba Timur	106	97	36	60	3
3	Kupang ¹⁾	95	98	139	126	9
4	Timor Tengah Selatan	164	137	55	120	7
5	Timor Tengah Utara	129	107	30	106	14
6	Belu	137	130	93	81	3
7	Alor	118	136	95	103	7
8	Lembata	95	94	53	48	1
9	Flores Timur	70	86	119	69	4
10	Sikka	67	61	83	30	4
11	Ende	170	132	72	79	7
12	Ngada	32	42	45	29	4
13	Manggarai	12	19	39	45	2
14	Rote Ndao	57	41	55	48	5
15	Manggarai Barat	27	22	47	50	6
16	Sumba Tengah	25	26	5	14	6
17	Sumba Barat Daya	51	36	2	18	5
18	Nagekeo	61	51	33	41	2
19	Manggarai Timur	33	20	38	30	-
20	Kota Kupang	33	24	15	35	3
Provinsi NTT		1.520	1.390	1.059	1.154	93

Sumber: Podes 2008

Keterangan : 1. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 5.2. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2011

No.	Kabupaten/Kota	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip/Linmas	Memeriksa Warga Luar Desa yang Masuk	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumba Barat	31	30	10	24	5
2	Sumba Timur	89	80	24	68	3
3	Kupang	25	32	21	44	2
4	Timor Tengah Selatan	132	101	31	98	2
5	Timor Tengah Utara	123	87	27	62	2
6	Belu	117	119	83	87	5
7	Alor	36	73	44	69	3
8	Lembata	65	57	24	22	2
9	Flores Timur	37	37	34	62	1
10	Sikka	27	32	51	32	5
11	Ende	94	67	24	49	11
12	Ngada	25	24	31	21	3
13	Manggarai	5	10	24	21	-
14	Rote Ndao	7	10	9	37	-
15	Manggarai Barat	8	15	11	23	4
16	Sumba Tengah	30	32	8	20	3
17	Sumba Barat Daya	43	44	4	24	2
18	Nagekeo	17	18	17	22	-
19	Manggarai Timur	10	15	53	24	3
20	Sabu Raijua	27	24	13	22	7
21	Kota Kupang	7	9	2	27	5
Provinsi NTT		955	916	545	858	68

Sumber: Podes 2011

Tabel 5.3. Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2008

No.	Kabupaten/Kota	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip/Linmas	Memeriksa Warga Luar Desa yang Masuk	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumba Barat	71.70	58.49	9.43	41.51	1.89
2	Sumba Timur	67.95	62.18	23.08	38.46	1.92
3	Kupang ¹⁾	39.58	40.83	57.92	52.50	3.75
4	Timor Tengah Selatan	68.33	57.08	22.92	50.00	2.92
5	Timor Tengah Utara	74.57	61.85	17.34	61.27	8.09
6	Belu	65.87	62.50	44.71	38.94	1.44
7	Alor	67.43	77.71	54.29	58.86	4.00
8	Lembata	73.64	72.87	41.09	37.21	0.78
9	Flores Timur	30.97	38.05	52.65	30.53	1.77
10	Sikka	41.88	38.13	51.88	18.75	2.50
11	Ende	79.81	61.97	33.80	37.09	3.29
12	Ngada	34.04	44.68	47.87	30.85	4.26
13	Manggarai	8.57	13.57	27.86	32.14	1.43
14	Rote Ndao	71.25	51.25	68.75	60.00	6.25
15	Manggarai Barat	22.31	18.18	38.84	41.32	4.96
16	Sumba Tengah	58.14	60.47	11.63	32.56	13.95
17	Sumba Barat Daya	53.13	37.50	2.08	18.75	5.21
18	Nagekeo	65.59	54.84	35.48	44.09	2.15
19	Manggarai Timur	28.95	17.54	33.33	26.32	-
20	Kota Kupang	67.35	48.98	30.61	71.43	6.12
Provinsi NTT		54.23	49.59	37.78	41.17	3.32

Sumber: Podes 2008

Keterangan : 1. Termasuk Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 5.4. Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Setahun Terakhir, Tahun 2011

No.	Kabupaten/Kota	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip/Linmas	Memeriksa Warga Luar Desa yang Masuk	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumba Barat	51.67	50.00	16.67	40.00	8.33
2	Sumba Timur	57.05	51.28	15.38	43.59	1.92
3	Kupang	14.12	18.08	11.86	24.86	1.13
4	Timor Tengah Selatan	55.00	42.08	12.92	40.83	0.83
5	Timor Tengah Utara	64.06	45.31	14.06	32.29	1.04
6	Belu	56.25	57.21	39.90	41.83	2.40
7	Alor	20.57	41.71	25.14	39.43	1.71
8	Lembata	45.14	39.58	16.67	15.28	1.39
9	Flores Timur	14.80	14.80	13.60	24.80	0.40
10	Sikka	16.88	20.00	31.88	20.00	3.13
11	Ende	43.93	31.31	11.21	22.90	5.14
12	Ngada	24.27	23.30	30.10	20.39	2.91
13	Manggarai	3.36	6.71	16.11	14.09	-
14	Rote Ndao	7.95	11.36	10.23	42.05	-
15	Manggarai Barat	6.61	12.40	9.09	19.01	3.31
16	Sumba Tengah	69.77	74.42	18.60	46.51	6.98
17	Sumba Barat Daya	44.79	45.83	4.17	25.00	2.08
18	Nagekeo	17.00	18.00	17.00	22.00	-
19	Manggarai Timur	5.68	8.52	30.11	13.64	1.70
20	Sabu Raijua	42.86	38.10	20.63	34.92	11.11
21	Kota Kupang	13.73	17.65	3.92	52.94	9.80
Provinsi NTT		32.20	30.88	18.37	28.93	2.29

Sumber: Podes 2011

**TIM PENULIS
STATISTIK KRIMINAL
Nusa Tenggara Timur
2009-2011**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. S. Aden Gultom, M.M.

Penyunting : Martin Suanta, SE
Sabar Anthony Nainggolan, SST

Penulis : Diah Ayu Utami, SST

Pengolah Data : Sabar Anthony Nainggolan, SST
Diah Ayu Utami, SST

<https://int.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi NTT
Jl. R. Soeprapto No. 5 Kupang 85111
Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124
E-mail: bpsS300@bps.go.id
www.ntt.bps.go.id